



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ALASAN-ALASAN BERTAHANNYA KELUARGA YANG BERMUKIM
DI DAERAH RAWAN BENCANA LERENG GUNUNG PADANG
KEC. PADANG SELATAN**

SKRIPSI



**RIZKA WULANDARI
BP. 07191027**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

RIZKA WULANDARI BP 07191027 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Alasan-Alasan Bertahannya Masyarakat Yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana Lereng Gunung Padang. Jumlah Halaman Skripsi 126 Halaman. Pembimbing I Drs. Rinaldi Eka Putera M.Si, Pembimbing II Drs. Ardi Abbas, MT.

Kota Padang merupakan kota dengan topografi datar dan berbukit. Akibat pertumbuhan penduduk, maka daerah datar semakin sempit. Untuk itu dataran tinggi berupa perbukitan juga dijadikan permukiman penduduk walaupun rawan bencana seperti di Gunung Padang Kec. Padang Selatan. Rumah-rumah tersebut pada umumnya dibangun tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Walaupun sudah ditetapkan daerah rawan bencana, tetapi masyarakat tetap bertahan dengan konsekwensi dapat merenggut harta, jiwa, dan keluarga mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan-alasan bertahannya keluarga yang bermukim di daerah rawan bencana lereng Gunung Padang, dengan tujuan khususnya: (1) mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi penduduk di lereng Gunung Padang, (2) mendeskripsikan pola permukiman penduduk di lereng Gunung Padang, (3) mendeskripsikan alasan-alasan bertahannya keluarga yang bermukim di daerah rawan bencana lereng Gunung Padang dari beberapa aspek, (4) mendeskripsikan kebijakan pemerintah bagi permukiman penduduk di lereng Gunung Padang.

Dalam upaya melihat masalah permukiman ini peneliti menggunakan teori pertukaran (*exchange*) yang dikembangkan oleh George C. Homans yang mengkaji tentang prilaku dan tindakan manusia dalam lima proposisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh di lapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran tentang masalah yang ada. Pengambilan informan dengan cara *purposive sampling* (sengaja) dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Alasan-alasan bertahannya keluarga yang bermukim di daerah rawan bencana lereng Gunung Padang terbagi dalam beberapa aspek yaitu: (1) aspek ekonomi disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tuntutan mata pencaharian, murahnya sewa tanah atau uang hak pakai, adalah karena keterbatasan ekonomi, serta murahnya harga sewa tanah atau uang pakai tanah, (2) Aspek hukum disebabkan karena lemahnya hukum, kurangnya perhatian pemerintah, ketidakpedulian pemerintah, serta ketiadaan alternatif yang lebih baik (3) Aspek sosial disebabkan karena adanya rasa persaudaraan dan kekeluargaan kekeluargaan tanpa memandang latar belakang dan status sosial antara warga asli dan pendatang, (4) Aspek Psikologi disebabkan karena kepasrahan keluarga tanpa memperdulikan keberadaan di zona rawan bencana (5) Aspek lahan terjadi karena bercampurnya antara permukiman penduduk dengan areal perkuburan sehingga lahan pertanian menjadi terbatas

ABSTRACT

RIZKA WULANDARI BP 07191027 The Faculty of Sociology Social and Political Sciences Department of Sociology, University of Andalas Padang. Thesis Title: The Reasons of Community Persistence who Living in Disaster Prone Areas the Slopes of Gunung Padang. Sheet Thesis Total 125 pages. Counsellor I Drs. Rinaldi Eka Putra M.Si, counsellor II. Drs. Ardi Abbas, MT.

The Padang City is a city with a flat and hilly topography. Due to population growth, the more narrow flat area. For that plateau of hills is also used as a disaster-prone settlements, although as in Mount Padang. The houses are generally built without a Building Permit (IMB). Although it has been set of disaster-prone areas, but people can still survive with the consequences of property grabbing, soul, and their families. Based on these problems, this study aims to describe the reasons for the persistence of families who live in disaster prone areas the slopes of Gunung Padang, with the aim in particular : (1) describe the socio-economic conditions of the population on the slopes of Gunung Padang, (2) describe the pattern of settlements on the slopes Mount Padang, (3) describes the reasons for the persistence of families who live in areas prone slopes of Mount Padang from several aspects, (4) describes the government policies for settlements on the slopes of Gunung Padang.

In an effort to see this settlement problem researchers use the theory of exchange (exchange) developed by George C. Homans a review of the attitude and actions of man in five propositions. This study uses qualitative research methods to the type of descriptive approach. Data analysis using descriptive methods of data obtained in the field systematically arranged and presented in a descriptive so as to provide an overview of the problem. Taking informants by means of purposive sampling (deliberate) and in data collection technique used observation and depth interviews.

From the results obtained the conclusion that the reasons for the persistence of families who live in disaster prone areas the slopes of Gunung Padang divided in several aspects: (1) economic aspects due to lack of education and skill level, the demands of livelihood, cheap rental rights to use land or money , is due to economic constraints, as well as the cheapness of land or money rents of land use, (2) is caused because of weak legal aspects of law, lack of government attention, government indifference, and lack of a better alternative (3) The social aspect due to a sense of brotherhood and familial kinship regardless of background or social status between natives and immigrants, (4) Psychological Aspects caused by resignation, regardless of the existence of families in disaster-prone zones (5) Aspects of the land occurs because the mixing between the residential area of agricultural land into burial ground so limited.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya skripsi yang berjudul **Alasan-Alasan Bertahannya Keluarga Yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana Lereng Gunung Padang Kec. Padang Selatan** dapat penulis selesaikan setelah mengalami serangkaian perbaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Penyelesaian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing akademik serta kepada Bapak Drs. Ardi Abbas, MT selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk, nasehat, masukan, kritikan, saran dan bimbingan serta motivasi kepada penulis sejak dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ketua RT Seberang Pabayan, kelurahan Batang Arau dan kantor Kec. Padang Selatan, informan yang telah memberikan informasi serta menyediakan waktunya untuk diwawancarai.
3. Segenap tim penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik (Bapak Dr. Elfitra, M.Si, Ibu Dra. Mira Elfina, M.Si, Ibu Aziwanti, SH. M.Hum, serta Bapak Drs. Wahyu Pramono, M.Si)
4. Seluruh Staf Pengajar di Fisip Unand yang telah mencurahkan ilmunya dan membimbing selama perkuliahan dan semua Staf Biro Akademik (Ni Lis, Ni As, Pak Ben, Kak Adek, Kak Puput dll)
5. Ni Ita yang banyak membantu dengan kesabarannya dan ketulusannya, pengurus Labsos (SiMas, Heru, Wiwi, Elsi dll) serta adek² '10

6. Teristimewa untuk Keluarga Besar Maswar (*S'moga tangan² malaikat-NYA selalu menjagamu Pa, baru ini yang bisa ku persembahkan untukmu disana*), Bunda Asnita (*Mom, beliau tersenyum bangga padamu*☺), Buat Uda Fend (*fiāsīik pūnyō pōnā'ān liāk t̄p lūnī ādō nān bōntuāk ikā*), Uūi Us (*mokasi kebayanyo uni sayang :**), Uda Aidil (*lai ndak sampei target 5thn doh*), Uda Zone (*Thanks very² much 4 sending money my bro, sangat membantu adikmu ini*), Adik semata wayang Yullia (*Lanjutkan! bisnis² kecil itu InsyaAllah pasti akan selalu berkembang*) & para jagoan kecilku Ilham, Iqbal, Rasha & Sandy (*ante ika cantik kan pake kebaya :D*)
7. ASC 07. Bestfriend yang pernah mengukir kisah klasik para Mafia: Celok, Cute (*come on guys, you can do it!*), Cila, Teteh (*kangen hangout kea dlu lagi*☺), Incim, Ndut (*pacapeklah proposal tu jan BB juo panganaha*), Izel (*yeay wisuda bareng*) & Cecep (*printer mu sangat membantu cuiy:p*), teman seperjuangan proposal Siscanda (*bergegas jgn bbm-an tyus :p*), Arman, Mas, Bobon, Farid, Edo, Nicko, Arif, Aidil, Bg Dik, Anton, Dika, Nova, Sinta, Baim, Daniel, bg Mantok, ayah Fauzan (*smangat*). Teman² yang lagi berjuang (Yogi, Elen, Ani, Ipal) Amel & Pipit (*nge-twit trus nih but Thank's 4 translate*) Buat temen² yang duluan, makasi supportnya sebelum kompre Nela, Farisa, Tika, Era. *All sampe kapan Homestay depending :D?*
8. Genta Andalas, pengurus 09: Eni, Intan, Dika (*yeay wisuda bareng dink*) Levi (*teman se kos, agak lama aku nyusul nih, mungkin lingsung setelah ditinggal*☺), Sari, Bg Océ, Bg Migo, Eka, kak Rika, kak Nova, kak Chay, Bg Arief. Pengurus '10: Arga, Linda, Isil, Feni, Cecep, Yoga, Andre, Nanda, Deno, Rendra, Dede, Ryan, Ndes, Lia, Upi, Yona, adek²qu : Elin, Nita, Ijah, dan Eji "*gak sia² jadi pengurus selama 2 tahun banyak kenangan pahit, manis haru dan canda terukir dalam sanubari*" (*dalem*). Bg Dion (*yaah...setidak'y sudah nyoba pisang karamel wlp 1 biji tp Alhamdulillah yahh... sesuatu*), Bg Erik & kak Zie, terakhir untuk adik² terhebatku: Vita, David, Dini, Ora, Oji, Ira Ivan, Leni, Andri, Ilham, & Yusran beserta adik² angkatan 2011 (*mengutip kalimat bg Arif "smoga ilmunya berguna untuk semesta"*☺)

9. Teman KKN '10 Lakitan Selatan jor. Koto Raya Pessel EVRAY : Edo (*mpuank taragak sate lokan*), Vina: (*kangen tidur bareng kalian*) Ayu: (*lamo ndak ado basuo*) Yosi (*yeay wisuda bareng*)
10. Asoka 05: Kak Capink, Kak Ica, Kak Helen, Bg Rio bg Fahmi, Bg Riki Bule (*semangat bg*), Babe (*kompe bareng wak iah be*). Sos 06: Bg Ai, Armen, Bogor (*pasti terlenta siap seminar*), Bg Niko & Uda Heru (*senang bisa mendengar kegalauan pada malam itu*).
11. Adik² Sos 08: Zeni, Dwi, Mitya, dan bagi semua yang sudah seminar (*sukses skripsi'y*). Sos 09: Fany, Jonda, Edo, Iwan, Yudi, Ade, Iman, Boy, Rudi, Dewi, Ika, & tak ketinggalan adik² angkatan '10 & '11
12. Adik² yang menyayangiku: Dhe Hasnah (*klo bukan krna ditemani semangat da mgkn kk masih trjebak dalam penelitian*), adik² kos Green House: Diol, Imel serta Ica: (*makasi atas jasa atm berjalan'y sampe batas terakhir*), Sepupuku Riva: (*selagi muda cetak prestasi w/ petronville*)
13. Buat Dimas Haryo: (*pasti ada jalan lain untuk semua cita², impian & harapan itu 'Trust me'*). Untukmu di Negeri Sakura Byan Zacky (*Sukses S2'y & cepet balik ke Indo*)
14. Terakhir untuk One Heart My Beat yang slalu setia menemani perjuanganku (*maaf kadang kau menjadi dekil karna kurang terawat*)

Semoga segala bantuan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan menjadi ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari teknik maupun materinya. Untuk itu penulis dengan senang hati membuka diri terhadap setiap bentuk saran maupun kritikan yang sifatnya membangun. Akhirnya dalam segala keterbatasan tersimpan harapan semoga skripsi ini berguna.

Padang, Januari 2012

RIZKA WULANDARI

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Persembahan	
Pernyataan	
Lembar Pengesahan	
Lembar Persetujuan	
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.5.1 Pendekatan Sosiologi.....	11
1.5.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
1.5.3 Pengertian Permukiman.....	20
1.5.4 Pengertian Kelompok Sosial dan Permukiman yang Terpinggirkan	22
1.5.5 Urbanisasi dan Masyarakat Perkotaan.....	24
1.5.6 Kemiskinan Perkotaan.....	26
1.6 Metode penelitian	28
1.6.1 Pendekatan Penelitian.....	28
1.6.2 Pemilihan Informan	29
1.6.3 Teknik dan Proses Pengumpulan Data	33
1.6.4 Proses Penelitian.....	38
1.6.5 Unit Analisis.....	42
1.6.6 Analisis Data	43
1.6.7 Lokasi Penelitian	44
1.6.8 Definisi Operasional	45
1.6.9 Jadwal Penelitian.....	49
BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Kota Padang	50
2.2 Deskripsi Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan .	52
2.2.1 Keadaan Geografis	52
2.2.2 Penduduk	53
2.2.3 Pendidikan	54
2.2.4 Mata Pencarian Penduduk	55

2.2.4 Mata Pencaharian Penduduk	55
2.2.5 Agama.....	56
2.2.6 Mobilitas Sosial	56
2.2.7 Sarana Sosial	57
2.3 Gambaran Gunung Padang.....	59
2.4 Deskripsi Permukiman Penduduk di Lereng Gunung Padang ...	61
2.4.1 Sejarah Permukiman Penduduk di Lereng Gunung Padang	61

**BAB III ALASAN-ALASAN BERTAHANNYA KELUARGA
YANG BERMUKIM DI DAERAH RAWAN BENCANA
LERENG GUNUNG PADANG KEC. PADANG SELATAN**

3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Lereng Gunung Padang..	68
3.1.1 Identitas Informan	68
3.1.2 Kondisi ekonomi	72
3.1.3 Kondisi Tempat Tinggal dan Fasilitas yang Dimiliki	74
3.1.4 Awal Kedatangan ke Gunung Padang.....	77
3.1.5 Hak Pakai Atas Tanah	80
3.1.6 Bukti Kepemilikan Tanah dan Rumitnya Pengurusan IMB	82
3.2 Pola Permukiman Penduduk di Lereng Gunung Padang.....	84
3.3 Alasan-Alasan Bertahannya Keluarga Bermukim di Daerah Rawan Bencana Lereng Gunung Padang dari Beberapa Aspek..	90
3.3.1 Ekonomi.....	90
3.3.2 Hukum.....	98
3.3.3 Sosial.....	108
3.3.4 Psikologi.....	116
3.3.5 Keterbatasan Lahan.....	118
3.4 Kebijakan Pemerintah Bagi Permukiman Penduduk di Lereng Gunung Padang.....	120

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan.....	124
4.2 Saran	128

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel I.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 1.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	37
Tabel I.2 Jadwal Penelitian	49
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Batang Arau.....	54
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian.....	55
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan agama	56
Tabel 2.5 Mobilitas Penduduk.....	57
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	57
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan	58
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Peribadatan	58
Tabel 3.1 Informan Kunci	68
Tabel 3.2 Identitas Informan Biasa	69
Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi Informan.....	72
Tabel 3.4 Kondisi Tempat Tinggal dan Fasilitas Yang Dimiliki.....	75



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Sketsa Kelurahan Kecamatan Padang Selatan.....	53
Gambar 2.2 Gunung Padang Dilihat Dari Kawasan Pekuburan Cina Pada Masa Lalu.....	63
Gambar 2.3 Kondisi Batang Arau Diwaktu Dulu Dilihat Dari Gunung Padang.....	63
Gambar 2.4 Gambar kawasan Gunung Padang dan Batang Arau Saat Itu.....	64
Gambar 3.1 Kondisi Permukiman Kawasan Gunung Padang	86
Gambar 3.2 Mengelompok.....	87
Gambar 3.3 Terpusat Mengikuti Bentuk Jalan.....	87
Gambar 3.4 Mengikuti Tingkat Kemiringan Tanah.....	88
Gambar 3.5 Dekat Sumber Mata Pencarian.....	89
Gambar 3.6 Rumah Yang Cukup Besar di atas Tanah Hak Pakai.....	95
Gambar 3.7 Rumah-rumah Yang Kena Bongkar.....	100
Gambar 3.8 Rumah-Rumah Yang Berada di Lereng Bukit Yang Terjal.....	114
Gambar 3.9 Perumahan dan Areal Pekuburan.....	120



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Lampiran Data Informan
3. Lampiran Transkrip Wawancara
4. Lampiran Dokumentasi Pribadi
5. Rekomendasi



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masalah permukiman sudah lama menjadi perhatian dunia Internasional karena memiliki dimensi persoalan yang luas seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi dan pertumbuhan perkotaan. Pada tahun 2010 telah diselenggarakannya tiga rangkaian kegiatan penting yaitu *World Urban Forum 5 (WUF)*, *World Shanghai Expo 2010*, dan *3rd Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD)* didorong oleh rasa keprihatinan pada kondisi permukiman yang ada di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk merupakan tantangan serius diseluruh dunia. Banyak kota berpenduduk di atas sepuluh juta jiwa, sehingga banyak masalah yang mencakup kependudukan seperti perumahan, sarana prasarana, lingkungan hidup, ekonomi kota, transportasi, sampai manajemen perkotaan (Departemen Pekerjaan Umum). <http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=288> Diakses 13November 2011.

Masalah permukiman yang ada di perkotaan tak terlepas dari masalah ledakan penduduk akibat urbanisasi. Adanya berbagai aspek kehidupan yang menjanjikan di perkotaan seperti aspek sosial sebagai pusat pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pemerintahan telah mendorong kaum migran berbondong-bondong melakukan urbanisasi. Konsekuensi dari keadaan ini adalah kian padatnya kota dengan makin bertambahnya jumlah penduduk.

Proses penambahan penduduk di perkotaan pada dasarnya terjadi karena tiga hal: Pertama, adanya penambahan alami. Kedua, adanya perluasan batas wilayah kota, sehingga daerah yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori daerah perkotaan sekarang menjadi kota. Ketiga, adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan (urbanisasi) (Hendri Zulviton, 2010:1) <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-12528-Chapter1.pdf>) Diakses 20 Oktober 11

Perkembangan jumlah penduduk kota selalu diikuti oleh perkembangan tuntutan akan ruang untuk bermukim. Oleh karena luas lahan terbuka di perkotaan bersifat tetap, sedangkan tuntutan akan ruang untuk permukiman bersifat berkembang, maka tuntutan akan permukiman melebar ke daerah pinggiran kota yang masih terbuka akibat dari pertumbuhan penduduk kota yang pesat dan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan hidup dan penyediaan lahan permukiman yang memadai.

Kualitas permukiman berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi penghuninya. Kemampuan penyediaan perumahan secara formal, seperti real estate, dan perumahan dari pemerintah atau swasta sangat terbatas dan hanya menyentuh golongan menengah ke atas. Sementara golongan berpendapatan rendah dibiarkan mencari jalan keluar sendiri yang dampaknya adalah tumbuh subur permukiman informal (*informal housing*) yang memiliki kesan kumuh. Seringkali kawasan ini dituding sebagai ancaman serius bagi sistem dan mekanisme kehidupan perkotaan. Terkadang kawasan yang terjadi secara

spontanitas ini menjadi kawasan yang permanen dan sengaja menggunakan lahan-lahan yang seharusnya bukan diperuntukkan sebagai hunian yang betul-betul dihuni oleh penduduk yang nyaris tidak berdaya akibat tertindas oleh perkembangan kota yang tidak memasukkan penghuninya sebagai bagian dari perencanaan kota (Guntoro,2009:02). <http://eprints.lib.ui.ac.id/gigihguntoro/PengaruhModalSosial-Pendahuluanpdf>. Diakses 16 Juni 2011.

Saat ini angka kebutuhan rumah di Indonesia berkisar pada angka 7,1 juta hingga 8 juta unit rumah. Namun demikian, berdasarkan data dari Kementerian Sosial ada sekitar 22 juta unit rumah dengan kualitas rendah dan tidak layak huni (Menpera Suharso Monoarfa,). Angka ini merupakan perwakilan dari rakyat yang hidup miskin dan terpaksa bernaung di kolong-kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, bantaran sungai, emperan toko dan tempat-tempat lain yang boleh disebut tidak manusiawi. Sedangkan sebagian besar mereka yang memiliki rumah ternyata termasuk dalam kategori kurang layak huni, bahkan tidak layak huni. Hal ini dilihat dari segi lokasi, struktur bangunan, kondisi lingkungan, dan fasilitas MCK. <http://www.kompas.com/MenperaTentangRumahTidakLayakHuni.html>. Diakses 16 Juni 2011.

Tingginya kepadatan penduduk serta lahan yang terbatas, membuat warga kota terpaksa mencari alternatif lain untuk bisa bertahan hidup, salah satunya berpindah ke daerah yang berada di luar pusat kota yang masih terbuka; dikarenakan banyaknya permasalahan di pusat kota salah satunya tingginya harga lahan dan mahalnya biaya hidup. Sehingga terjadilah *segregasi* (pengelompokan)

penduduk yang menghuni suatu daerah hingga terbentuklah suatu pola permukiman yang berada di daerah pinggiran kota yang memiliki berbagai problematika, seperti masalah kelayakan huni, bergantinya lahan hijau menjadi lahan terbangun, fasilitas yang tidak memadai dan sebagainya. Hal ini juga yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan atau masyarakat yang termarginalkan dan cenderung tak tersentuh dan tak diperhitungkan dari pembangunan kota.

Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan. Permukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam permukiman. Permukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan (Srikurniasih, 2007:01)
<http://peneliti.budiluhur.ac.id/srikurniasih-.pdf>. Diakses 16 Juni 2011.

Sekurang-kurangnya 22% dari total penduduk atau sekitar 13 juta penduduk di Tanah Air masih menghuni rumah "ilegal" (Badan Pusat Statistik Data Perumahan 2010).

Kondisi ini disebabkan oleh belum sempurnanya penyelenggaraan perumahan, belum tersedianya peraturan pendukung, belum berjalannya institusi

penyelenggara perumahan dan juga status kepemilikan tanah masih merupakan persoalan besar. Sehingga membuat masyarakat berpenghasilan rendah dan termarginalkan cenderung menempati hunian seadanya bahkan cenderung ilegal karena ketidaksesuaian dengan aturan membangun yang ditetapkan pemerintah kota. Adanya rasa senasib dan kesamaan perlakuan membuat masyarakat yang termarginalkan membangun suatu kelompok sosial untuk mempertahankan keberadaan dari ancaman maupun dari aturan yang mengancam kehidupan mereka.

Kaum urbanis terpaksa harus puas dengan tingkat kehidupan tertentu bersama kaum marjinal lama di kota. Karena umumnya mereka berpendidikan rendah, memiliki keahlian yang terbatas. Mereka hanya cukup bertahan hidup sebagai buruh harian, nelayan, buruh gendong, penambal ban, pemulung, penarik becak musiman, pedagang eceran dalam gerobak dorong dan lain-lain. Kondisi yang bersifat marjinal menyebabkan mereka hanya mampu menempati rumah di lokasi kumuh. Mereka tinggal disuatu kawasan tertentu, seperti sepanjang bantaran sungai, sekitar pesisir pantai, rel kereta api, bahkan di balik perumahan elit di tengah kota. Mereka menempati dan membangun rumah dari potongan papan, potongan kardus, dan sebagian kecil membangun tempat tinggalnya dengan batu bata dan kayu secara sederhana (Hariyono, 2007:5).

Dengan peliknya permasalahan tentang susahny mencari pemukiman layak huni, malah diperparah lagi dengan kondisi kota Padang yang kontur geografinya sedikit yang datar. Kota Padang merupakan ibu kota propinsi

Sumatera Barat dengan tipe relief datar berbukit, hampir separo dari wilayah kota merupakan daerah perbukitan. Dinamika permukiman akibat perubahan penggunaan lahan terus terjadi, umumnya berkembang ke daerah pinggiran bagian timur dan selatan Kota Padang yang memiliki karakteristik fisik rentan terhadap bencana longsor yang banyak menimbulkan kerugian harta, benda, dan jiwa penduduk.

Lokasi kejadian longsor terdapat di kawasan Gunung Padang, yaitu di Bukit Lantiak, Bukit Gado-Gado, Bukit Mata Air, dan Bukit Air Manis. Selain itu, longsor juga terjadi di Bukit Gaung, Lubuk Minturun, Sitinjau Laut, Indarung, dan Bungus Teluk Kabung (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (BPBD)). <http://dedihermon.blogspot.com/2011/03/model-kestabilanlahan.html>.

Diakses 16 juni 2011

Walaupun dari segi peraturan, perilaku membangun di sini sangat tidak sesuai kategori, dimana membangun rumah di kawasan rawan bencana tanpa memiliki izin artinya *illegal housing* (rumah ilegal) tetapi kebanyakan di kawasan tidak layak huni maupun permukiman kumuh cenderung mendapatkan fasilitas listrik dan air. Hal ini disebabkan karena tingginya pertumbuhan penduduk yang tak sebanding hingga tak tertampung lagi oleh luasnya suatu kota yang struktur pembangunannya cenderung terpusat di area *The Core City dan CBD (Central Bussiness District)*; dimana di area ini harga tanah sangat mahal sehingga Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) membentuk suatu pemukiman baru. Tak penting layak atau legal, berbahaya atau rawan bencana yang terpenting bagi

mereka adalah dapat terlindung. Kondisi seperti inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan alasan bertahannya masyarakat bermukim di daerah rawan bencana yang ada di perkotaan. Karena masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana mempunyai perilaku dan alasan tersendiri atas tindakan mereka.

Kota Padang sedang giat-giatnya dalam pembangunan struktur tata ruang demi menuju kota metropolitan, tetapi keberhasilan pembangunan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari segi pembangunan fisik tetapi juga non fisik. Bagaimana dampak pembangunan tersebut bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Sehingga nantinya keberhasilan pembangunan yang terfokus pada kesejahteraan rakyatlah yang akan menjadi keberhasilan disegala segi kehidupan baik fisik maupun non fisik di kota Padang “Kujaga dan Kubela” ini, dan sebagai ibu kota provinsi, kota Padang merupakan suatu cerminan nyata yang menjadi tolok ukur bagi pembangunan kota-kota lain khususnya di Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang sedang berkembang di Indonesia. Mulai dari perkembangan pembangunan, struktur dan infrastruktur maupun perkembangan perekonomian. Berbagai macam potensi yang dimiliki daerah mampu menempatkan propinsi ini menjadi salah satu kota yang padat penghuni salah satunya kota Padang. Kota Padang sebagai ibukota propinsi menjanjikan banyak keunggulan baik dibidang pendidikan, ekonomi, maupun

pariwisata. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi kaum migran untuk datang berbondong-bondong ke kota ini.

Menurut data dari *Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2010*, Sumatera Barat adalah sebuah provinsi yang memiliki jumlah penduduk mencapai 4,8 juta jiwa dan kota Padang merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar yaitunya sebanyak 833.584 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 10 tahun terakhir (dari tahun 2000-2010) sebesar 1,57% per tahun dengan tingkat kepadatan 2000-3999 orang per kilo meter persegi.

Berdasarkan data diatas, tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman, serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat berpenghasilan menengah bawah, cenderung menempati hunian di pinggiran yang menimbulkan permukiman liar di daerah perkotaan tak terkecuali kota Padang. Hal ini dapat dilihat salah satu contohnya yaitu terjadi suatu pola menetap yang membuat warga kota terpaksa menghuni daerah disekitar lereng perbukitan Gunung Padang Kecamatan Padang Selatan.

Kawasan ini merupakan kawasan hijau perkotaan yang semestinya dilindungi dan juga kawasan rawan bencana tetapi pada kenyataannya dari tahun ke tahun semakin banyak berdiri rumah-rumah penduduk maupun bangunan baru di kawasan tersebut. Setelah dilakukan penelitian ternyata rumah-rumah ini

dibangun tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang artinya permukiman ilegal.

Penelitian ini penting dilakukan karena :

- a. Kota Padang merupakan daerah dengan kontur datar berbukit. Selain itu kota Padang juga dikelilingi perairan seperti aliran sungai dan laut.
- b. Dengan kondisi tersebut otomatis daerah datar sangat minim, sedangkan tuntutan akan ruang untuk permukiman sangat tinggi seiring perkembangan arus urbanisasi, yang mengakibatkan harga lahan di pusat kota mahal.
- c. Karena minimnya ruang maka terjadilah suatu pola menetap penduduk yang bermukim di kawasan yang semestinya dilindungi karena rawan longsor dan bencana alam.
- d. Daerah permukiman tersebut seharusnya menjadi daerah resapan air (ditanam dan dilestarikan) bukannya dibangun, karena daerah tersebut merupakan daerah hijau bukan *built up area*.

Dengan sedemikian banyak dan kompleksnya persoalan di Gunung Padang, namun belum banyak yang meneliti wilayah ini. Atas dasar itu maka rumusan permasalahan penelitian yaitu **“Apa Alasan-Alasan Bertahannya Keluarga Yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana Lereng Gunung Padang Kec. Padang Selatan?”**

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

I.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan alasan-alasan bertahannya keluarga yang bermukim di daerah rawan bencana lereng Gunung Padang

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi keluarga di lereng Gunung Padang.
- b) Mendeskripsikan pola permukiman penduduk di lereng Gunung Padang
- c) Mendeskripsikan alasan-alasan bertahannya keluarga yang bermukim di daerah rawan bencana lereng Gunung Padang dari beberapa aspek
- d) Mendeskripsikan kebijakan pemerintah bagi permukiman penduduk di lereng Gunung Padang

I.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi dalam dua bentuk yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat akademis

- Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan sosiologi perkotaan dan masalah sosial di perkotaan.

- penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan berharga atau referensi bagi mahasiswa dan pengembangan akademis

2. Manfaat praktis

- Penelitian ini bermanfaat menambah pemahaman tentang alasan bertahannya masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana yang ada di perkotaan.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pemerintahan Kota Padang

I.5 Kerangka Pemikiran

I.5.1 Pendekatan Sosiologi

Sosiologi adalah sebuah ilmu yang memahami atau mempelajari fenomena sosial dari beberapa sudut pandang (paradigma), yang bertujuan sebagai pendekatan dan kerangka pemikiran dalam mendekati sebuah masalah. Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma perilaku sosial. Dimana pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkahlaku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkahlaku. Jadi terdapat hubungan fungsional antara tingkahlaku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor (Ritzer, 2004:74).

Bagi paradigma definisi sosial, aktor adalah dinamis dan mempunyai kekuatan kreatif di dalam proses interaksi. Aktor tidak hanya sekedar penggenap stimulus tetapi menginterpretasi yang diterimanya menurut cara mendefinisikan stimulus yang diterimanya. Bagi paradigma perilaku sosial, individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikannya ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Paradigma fakta sosial melihat tindakan individu ditentukan oleh norma, nilai, dan struktur sosial (Ritzer, 2003: 72).

Untuk lebih memfokuskan dalam melihat permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka digunakan salah satu dari teori yang dianggap relevan dengan objek penelitian, yaitu teori pertukaran (*exchange*) dengan tokoh utamanya George C. Homans.

Homans mengatakan bahwa ada beberapa proposisi yang perlu diperhatikan terhadap penyebab dari tindakan sosial yaitu dengan adanya *reward*, *punishment* serta adanya hubungan berantai antara stimulus dan antara berbagai tanggapan (Ritzer, 2004:78).

Teori pertukaran Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Homans tidak hanya membatasi kajiannya pada perilaku ekonomis tetapi Homans melihat semua perilaku sosial bisa memperoleh pertukaran seperti itu. Bagi Homans sebagai seorang ahli teori pertukaran, bukan hanya status dan peranan yang berasal dari fungsionalisme yang menyediakan mata rantai antara individu yang

terlibat dalam proses pertukaran barang berwujud materi maupun non materi (Homans dalam Poloma, 2007:59-61).

Homans percaya bahwa proses pertukaran ini dapat dijelaskan lewat lima pernyataan proposional yang saling berhubungan. Melalui proposisi itu banyak perilaku sosial yang dapat dijelaskan. Proposisi itu adalah:

1) Proposisi Sukses

Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh suatu ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Dalam proposisi ini Homans menyatakan bahwa bilamana seseorang berhasil memperoleh ganjaran (menghindari hukuman) maka ia akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut (Homans dalam Poloma, 2007:61).

Dalam sejarah kota Padang Freek Colombijn memaparkan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan ruang, orang harus menyesuaikan diri dengan ruang disekitarnya, namun pada saat yang bersamaan orang tadi mengubahnya sehingga ruang tersebut terus berubah (Colombijn, 2006:1) Perubahan-perubahan dalam penggunaan ruang di Gunung Padang terjadi karena pemakaian lahan-lahan tertentu. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memilih tinggal di kemiringan bukit dengan konsekuensi banyaknya bahaya bagi kehidupan mereka. Terlepas dari bahaya seperti longsor membuat masyarakat cenderung bertahan dan menyatakan haknya tinggal di sana. Sehingga lama kelamaan permukiman tersebut menjadi liar dan tak terkendali.

2) Proposisi Stimulus

Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli, merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Yang diketengahkan oleh proposisi stimulus ini adalah obyek atau tindakan yang memperoleh ganjaran yang diinginkan (Homans dalam Poloma, 2007:62).

Dalam problematika ruang yang terbatas dan semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga permintaan akan tempat tinggal melebihi persediaan yang ada. Penduduk kota Padang menghuni lereng Gunung Padang dengan harapan pemerintah bisa memperhatikan kehidupan mereka. Dengan semakin bertambahnya permukiman di sana membuat pemerintah memberikan kemudahan akses dan memberi fasilitas air dan listrik. Sehingga perilaku masyarakat menimbulkan ganjaran yang diinginkan yaitu adanya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.

3) Proposisi Nilai

Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini khusus berhubungan dengan ganjaran dan hukuman yang merupakan hasil tindakan. Apa yang diketengahkan oleh proposisi nilai adalah tingkat di mana orang

menginginkan ganjaran yang diberikan oleh stimulus (Homans dalam Poloma, 2007:63).

Dengan adanya masalah tanah ulayat dan hak pakai atas tanah dari pemangku kaum bagi warga pendatang membuat mereka merasa terlindungi dengan aturan dan hukum tradisional Minangkabau terkait permasalahan tanah ulayat ini. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota tumbuh subur di areal perbukitan Gunung Padang karena adanya hukum-hukum adat maupun resistensi (perlawanan) dari warga.

4) Proposisi Deprivasi-Satiassi

Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu. Proposisi ini selanjutnya menyempurnakan kondisi-kondisi di mana penampilan suatu tindakan tertentu mungkin terjadi (Homans dalam Poloma, 2007:63-64).

Mahalnya harga tanah di pusat kota sedangkan di lereng Gunung Padang hanya menyewa dengan harga murah menjadikan pembangunan rumah-rumah tersebut tak terkendali. Diantara mereka banyak yang masih berstatus keluarga sehingga suatu waktu permukiman tersebut dihuni oleh latar belakang keluarga yang sama. Dengan adanya permukiman yang tak terkendali pemerintah berusaha melakukan pengusuran dengan alasan ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menyalahgunakan ruang yang seharusnya sebagai kawasan lindung.

5) Proposisi Restu-Agresi (*Approval-Agression*)

Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah; dia akan menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya. Bilamana tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khusus ganjaran yang lebih besar dari yang dikirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka dia akan merasa senang, dia akan lebih mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya. Dalam proposisi ini Homans berbicara tentang perilaku emosional manusia. Seseorang akan marah bilamana yang diharapkannya ternyata meleset. Homans menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga sosial itu benar-benar ada disebabkan oleh pertukaran sosial dan hal itu akan dianalisa dengan kelima proposisi diatas. Ganjaran-ganjaran itu dapat berwujud materi dan non materi (Homans dalam Poloma, 2007:64-65).

Dengan adanya penggusuran dan pembongkaran oleh pemerintah terkait terhambatnya pembangunan untuk kawasan wisata Taman Siti Nurbaya membuat masyarakat yang terkena gusur marah dan tidak menerima perlakuan tersebut. Masyarakat dengan berbagai alasan mengutarakan hak dan ketidaksenangannya terhadap pemerintah yang membongkar tempat tinggal mereka. Pemerintah yang telah berjanji tidak akan menyusahkan masyarakat hanya bisa memberi ganti rugi walaupun tanah yang dipakai bukanlah tanah mereka. Menyadari akan hal itu

warga yang hanya memakai tanah dan mendapat ganti rugi merasa puas karena tindakan mereka memberi keuntungan yang berlipat ganda. Sehingga warga tersebut kembali membangun permukiman baru tidak jauh dari lokasi yang tergusur. Begitupun yang dilakukan oleh tuan tanah yang memberikan hak pakai kepada warga yang menetap disana. Ibu I sebagai orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang hanya bisa pasrah untuk menolong kaum miskin tanpa membutuhkan ganjaran materi. Ganjaran non materi baginya dapat berupa kepuasan penghargaan orang lain dalam arti moral dari tindakan membantu mereka yang kurang beruntung.

Jadi dalam hal ini masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Padang tentunya mempunyai alasan dan prilaku tertentu dalam bertahan di daerah rawan bencana. Melakukan suatu tindakan, khususnya tindakan yang berkaitan dengan cara mereka untuk bertahan. Karena dari tujuan itu nantinya akan melahirkan bagaimana tindakan tersebut diarahkan. Apakah prilaku dan tindakan tersebut akan mendapatkan ganjaran atau hukuman atautkah hanya mendapatkan tanggapan saja dari pemerintah tanpa adanya *reward* dan *punishment*.

1.5.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang permukiman oleh Widya Nur Azwir (1997), Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang IMB Dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur Birokrasi yang Dilaksanakan Untuk Memiliki IMB (Studi Kelurahan Padang Besi Kota Padang). Dalam mendirikan bangunan masyarakat perlu mengurus IMB terlebih dahulu sesuai Perda

No.01/DPRD/1972. Hal ini bertujuan agar bangunan yang dibuat menjadi serasi, rapi, indah, nyaman dan tertib, serta bangunan yang dibuat terdaftar di tata ruang kota dan punya kekuatan hukum yang pasti. Hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh antara tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan masyarakat tentang IMB dengan persepsi masyarakat terhadap prosedur birokrasi yang dilaksanakan untuk memiliki IMB (Azwir, 1997:iii).

Penelitian tentang permukiman oleh Djoko Kirmanto (2001), Kebijakan dan Strategi Nasional Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Palembang. Kesadaran masyarakat bermukim yang sehat, tertib dan teratur pada umumnya masih rendah, maka dalam upaya meningkatkan kesadaran perlu terus diupayakan penggalangan potensi masyarakat melalui proses pemberdayaan. Upaya melembagakan penataan lingkungan permukiman kumuh dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perlu terus ditumbuh kembangkan dengan mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau pada lingkungan permukiman yang berkelanjutan, responsif yang mendukung pengembangan jatidiri, produktivitas dan kemandirian masyarakat. Untuk mendukung pencapaian lingkungan permukiman yang responsif tersebut maka perlu langkah konkrit untuk mendayagunakan potensi masyarakat melalui kegiatan peningkatan kualitas permukiman, penerapan tata lingkungan permukiman, pengembangan perumahan yang bertumpu kepada swadaya masyarakat, pembukaan akses kepada sumber daya perumahan dan permukiman serta upaya-upaya pemberdayaan ekonomi khususnya bagi golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (Kirmantoro, 2001:iii).

Penelitian tentang permukiman perkotaan oleh Badruzzaman (2008), yaitu *Perkembangan Permukiman di Perkotaan Studi Tentang Dampak Perkembangan Permukiman Terhadap kehidupan Sosial Keagamaan di Kota Palopo*. Perpindahan penduduk ke kota (urbanisasi) yang berasal dari berbagai kawasan budaya, etnis dan tingkat sosial yang berbeda telah mengakibatkan perubahan-perubahan dalam interaksi sosial masyarakat kota (urban) itu sendiri. Masing-masing komponen masyarakat kota yang berbeda latar belakang itu memerlukan kemampuan penyesuaian diri satu sama lain untuk dapat membina keselarasan hubungan sosial dalam kebersamaan dan kehidupan bersama. Hasil penelitian bahwa perkembangan permukiman di Kota Palopo cenderung berpola segregasi status sosial, etnik dan okupasi, khususnya pada lokasi-lokasi pengembangan permukiman di perkotaan. Keadaan tersebut berdampak terhadap keserasian hubungan sosial, berupa dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisik berupa berkembangnya daerah-daerah *border line*, kesemrawutan permukiman dan pencemaran lingkungan; sedangkan dampak sosial antara lain munculnya kesenjangan sosial, kerawanan sosial, ketegangan sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan miras, narkoba, prostitusi dan pencurian (Badruzzaman, 2008:iii).

Penelitian tentang permukiman di perkotaan oleh Anhar Arif (2009) yaitu *Pengelolaan Lingkungan Pada Permukiman Kumuh Perkotaan. Studi kasus Permukiman Kumuh di Simpang Haru Kota Padang*. Di belakang Pasar Simpang Haru terdapat kelompok permukiman kumuh dengan ciri-ciri rumah yang berdempetan yang terbuat dari kayu, tidak memiliki MCK maupun sumber air

bersih yang sesuai dengan standar kesehatan. Hasil penelitian bahwa pengelolaan lingkungan pada permukiman kumuh perkotaan di Simpang Haru masih kurang, hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Masalah ekonomi mempengaruhi pengetahuan penduduk, terhadap lingkungan kumuh dan penduduk sudah terbiasa dengan keadaan kumuh karena penduduk yang tinggal di lokasi penelitian ini banyak warga pendatang dari daerah lain, tidak warga asli penduduk Simpang Haru oleh karena itu rasa kepeduliannya terhadap lingkungan permukimannya rendah dan juga hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Pengelolaan MCK, pada umumnya penduduk tidak mempunyai kakus. Sumber air bersih penduduk menggunakan sumur pompa, PAM dan air sungai. Pengelolaan limbah cair dan sampah rumah tangga penduduk miskin yang tinggal di permukiman kumuh ini, penduduk masih menggunakan badan air (saluran, sungai, kali, riol) sebagai tempat pembuangan limbah. Sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Simpang Haru berupa sampah basah dan kering, pengelolaannya dengan cara membakar atau membuangnya ke tempat pembuangan sampah walaupun, masih ada penduduk yang membuang sampahnya ke kali (Arif, 2009 : iii).

1.5.3 Pengertian Permukiman

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung

perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang Tahun 1997).

Permukiman di dalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu :

- a) Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- b) Kawasan yang didomisi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- c) Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap. Permukiman adalah suatu lingkungan hidup yang meliputi masalah lapangan kerja, struktur perekonomian dan masalah kependudukan yang bukan saja mencakup mengenai pemerataan dan penyebaran penduduk melainkan juga menyangkut kualitas manusia yang diharapkan pada generasi mendatang.

1.5.4 Pengertian Kelompok Sosial dan Permukiman Yang Terpinggirkan

Kelompok sosial adalah kumpulan dari sejumlah orang (berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu) yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi (Horton & Hunt, 1993: 214-216).

Kelompok sosial terpinggirkan atau lebih tepatnya kelompok sosial marjinal yaitu kelompok sosial yang menjadi bagian dari dua budaya atau dua masyarakat, tetapi tidak termasuk secara penuh (utuh) pada salah satu budaya atau masyarakat tersebut (Horton & Hunt, 1993: 402).

Mungkin definisi ini lebih mengena dari sudut sosial-budaya, untuk menggolongkan masyarakat urban di pinggiran kota-kota besar. Karena mereka tidak menjadi bagian penuh dari masyarakat kota, maka mereka luput dari perencanaan dan sentuhan pembangunan fasilitas kota. Tidak tersentuhnya kelompok sosial terpinggirkan dari program pembangunan fasilitas kota, juga disebabkan oleh karena mereka tinggal di wilayah kota yang terpinggirkan, yang tidak mesti harus terletak di pinggiran kota, tetapi bisa jadi dekat dengan pusat kota. Kelompok ini cenderung hidup seadanya dikarenakan ketidakberdayaan dalam persaingan hidup di pusat kota, seperti tidak mampu membeli maupun ketidakmampuan menyewa tanah atau perumahan di pusat kota.

Berhasilnya orang menempati situs di kota, pada akhirnya hanyalah karena tanah tersebut dapat diperas manfaatnya sebanyak-banyaknya, dan mampunya orang yang bersangkutan membayar harga sewanya. Persaingan tersebut paling kuat terjadi di bagian pusat kota, karena di kawasan itu tersaji lokasi-lokasi yang

paling menguntungkan, di samping tanah di situ memang langka. Karena alasan itu pula, maka harga tanah di kawasan pusat kota itu amat mahal (Daldjoeni, 2003: 198).

Sehubungan itu, diasumsikan adanya kota dengan pusat tunggal yang terletak di dataran tanpa topografi yang menonjol, sedang segala kegiatan penduduknya bertumpuk di pusat kota. Di dalam kota, biaya transportasi meningkat langsung mengikuti jarak yang ditempuh dari pusat kota, namun sewa yang tergantung dari keterjangkauan (*accessibility*) saja, berbanding terbalik dengan jarak. Artinya semakin menjauhi pusat kota, semakin menurunkan sewa. Para pemakai tanah di dalam kota menggunakan keputusan menurut tempatnya masing-masing dengan memperhitungkan kekuatan kantong mereka. Jika hal ini dihubungkan dengan kegiatan perdagangan eceran atau pertokoan, keterjangkauan tempat kegiatan mereka oleh penduduk amatlah penting, sehingga derajat menurunnya *economic rent* yang ingin mereka pakai untuk berbelanja, amat curam. Karena itulah maka, golongan ekonomi lemah demi penghematan biaya transportasi mencari tempat tinggal mendekati pusat kota yang kebetulan juga merupakan zona perumahan yang sewanya murah. Dengan demikian, demi mudahnya hidup, mereka bertumpuk-tumpuk di kawasan yang berpenduduk padat sekali (Daldjoeni, 2003: 201).

Dengan demikian maka, dari segi ekonomi kelompok sosial marjinal/terpinggirkan adalah masyarakat berpenghasilan rendah, yang memilih tinggal di bagian wilayah kota terpinggirkan. Pengertian permukiman kelompok sosial terpinggirkan yang dimaksud di sini, adalah permukiman kelompok sosial

miskin kota yang menghuni daerah yang berada di pinggiran kota dalam hal ini di zona rawan bencana yaitu di lereng Gunung Padang dengan kondisi tanah yang kurang menguntungkan.

1.5.5 Urbanisasi dan Masyarakat Perkotaan

Urbanisasi adalah perubahan keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula berdominan di perdesaan menjadi dominan di daerah perkotaan atau penambahan penduduk kota akibat migrasi penduduk dari desa ke kota (Kamus Tata Ruang, 1997:112).

Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat akibat urbanisasi tidak diimbangi dengan bertambahnya luas permukiman mendorong munculnya berbagai permukiman ilegal yang ditempati oleh sebagian besar kaum urban. Kaum urban yang tidak memiliki keterampilan yang mencukupi dan tidak dapat mengakses pekerjaan yang sesuai, harus bertahan hidup di daerah perkotaan. Permasalahan tak berhenti di situ, arus urbanisasi yang demikian tinggi menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di daerah perkotaan.

(<http://wordpress.com/2008/10/08/urbanisasi-danmasalahperkotaan>). Diakses 13 November 2011

Pada negara berkembang sebagaimana Indonesia, urbanisasi lebih banyak disebabkan oleh migrasi desa ke kota yang tercermin dari faktor-faktor daya dorong yang menghimpit kondisi ekonomi desa (*push factor*) dan juga karena kondisi perkotaan yang menarik kaum urbanis berdatangan untuk mencari

penghidupan yang lebih layak di perkotaan (*pull factor*). Sementara di negara maju sebanyak 70 sampai 80% dari penduduknya berdiam di perkotaan (Abbas, 2005 : 44)

Dari sudut pandang, sosiologi perkotaan sesungguhnya adalah merupakan area studi interdisipliner, artinya bahwa bidang lain dari sosiologi memberikan sumbangan pemahaman besar terhadap kota. Geografi, ilmu politik, ekonomi, sejarah, antropologi, dan psikologi keseluruhan studinya mengenai beberapa aspek dari lingkungan perkotaan dan memberikan sumbangan yaitu pengetahuan tentang lingkungan perkotaan. Berbicara tentang masyarakat perkotaan erat kaitannya dengan kajian sosiologi perkotaan yang mengkaji tentang masyarakat kota melalui pendekatan neo-dualis. Sosiologi perkotaan meninjau penggunaan lahan kota baik sebagai “produk” maupun “proses” bukan persoalan sosiologi perkotaan secara khusus ataupun persoalan geografi, tetapi juga sosiologi secara umum. Kota dipandang sebagai suatu obyek studi dimana di dalamnya terdapat masyarakat manusia yang sangat kompleks, telah mengalami proses interelasi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya (Tucker, 1978 : 595).

Lahan perkotaan sebagai produk dari interelasi penghuninya tercipta karena adanya keteraturan penggunaan lahan. Sedangkan dinamika kota sebagai proses merupakan bentuk artikulasi kelompok-kelompok yang mengalami proses interelasi yang sangat kompleks. Struktur ruang tidak dapat dikaitkan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat kota. Struktur ruang merupakan suatu produk sejarah yang harus dilihat sebagai kreasi agen-agen sosial atau aktor-aktor yang bersifat kolektif, interaksi, strategi, keberhasilan dan kegagalan agen-agen

membentuk kualitas dan karakteristik ruang kota. Kota ada dan keberadaannya dirasakan melalui perlawanan, konflik, model, gaya hidup, dan lain-lain. Negara sebagai representasi kekuasaan memiliki karakter dominan dalam upaya merebut penggunaan lahan perkotaan, melalui reproduksi aturan sebagai bentuk sumberdaya kekuasaan (Tucker, 1978 :595).

1.5.6 Kemiskinan Perkotaan

Dominasi kaum miskin di perkotaan menciptakan sedemikian banyak kendala bagi pengadaan rumah di perkotaan. Kendala ini berakar pada beberapa masalah:

- I. Tingkat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau, menjadi hal sulit untuk diwujudkan. Kebutuhan rumah layak huni setiap tahun bertambah rata-rata 710.000 unit. Sementara kemampuan pengadaannya berkisar mulai 100.000 unit sampai dengan 200.000 unit per tahun. Dengan demikian, selalu ada gap rata-rata sekitar 600.000 unit setiap tahunnya. Pada tahun ini, akumulasi defisit itu mencapai 8 juta unit.
<http://lipsus.kompas.com/smartliving/read/2011/02/11/20412210/Indonesia.Defisit.8.Juta.Unit.Rumah>. Diakses 13 November 2011
- II. Di perkotaan Indonesia terjadi penurunan kualitas lingkungan permukiman yang signifikan. Penurunan kualitas lingkungan ini disebabkan belum memadai pelayanan di lingkungan permukiman tersebut. Akibatnya, banyak kawasan perumahan dan permukiman yang melebihi daya

tampung dan daya dukung lingkungan (Ir. Aca Sugandhy MSc, Jakarta 2002).

- III. Kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi mereka sendiri sangat rendah. Di Indonesia, diperkirakan sekitar 65% rumah tangga tidak mampu membeli rumah sederhana dengan harga yang paling rendah. Sementara itu, kredit perumahan tanpa subsidi hanya dapat dijangkau oleh 25% populasi yang berpendapatan tinggi.
- IV. Kondisi kemiskinan membuat kelompok ini seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau permukiman liar di kota. Lingkungan kumuh yang dicirikan oleh minimnya sarana infrastruktur permukiman, menghadapkan kaum miskin pada buruknya kualitas kehidupan yang harus mereka tanggung di lingkungan permukiman.
- V. Penggunaan lahan di masa datang akan didominasi oleh kawasan perkotaan. Dengan orientasi semacam ini, tanah di perkotaan akan menjadi sumber daya yang terbatas dan mahal. Pada gilirannya, tingginya harga lahan membuat penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin menjadi hal yang semakin sulit lagi.
- VI. Sistem pembiayaan dan pasar perumahan/permukiman belum memberikan ruang yang cukup bagi kelompok miskin untuk mengakses perumahan.
- VII. Keenam kendala bagi pemenuhan kebutuhan perumahan kelompok masyarakat miskin ini membuat masyarakat miskin menempati rumah-rumah yang tidak layak di perkotaan, terutama sekali di lingkungan

kumuh. Karena perumahan merupakan dimensi kemiskinan yang paling nyata (Gilbert, 1996:107).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, kemiskinan di perkotaan masih menjadi persoalan besar, karena berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa persentase masyarakat miskin perkotaan di Indonesia masih tinggi yaitu 9.87% dari 13.33% penduduk miskin di Indonesia

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Afrizal, 2005: 14).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta-fakta, tetapi tidak melakukan

pengujian hipotesis. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian deskriptif mencoba untuk mencari data seluasnya dalam rangka mencari kondisi sosial dari sekelompok manusia (Moleong, 2004: 3).

Penggunaan metode ini akan memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian (Moleong, 1998 : 6).

1.6.2 Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Spradley,1997:35-36). Penulis menggunakan teknik pemilihan informan dengan teknik *purposive* yang mempertimbangkan azas kejenuhan data yaitu apabila sudah terdapat jawaban yang sama setiap informan, maka penambahan jumlah sampel dihentikan maksudnya adalah penulis menentukan sendiri informan penelitian berdasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. (Singarimbun,1992:112).

Pengambilan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* (sengaja). *Purposive sampling* adalah penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tujuannya adalah menjangkit sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang dibangun.

Para informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti (Afrizal,2005:66).

Teknik ini memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang informan, yang mana peneliti benar-benar yakin bahwa informan yang diambil dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Jumlah informan yang diambil dalam penelitian ini adalah berdasarkan keabsahan data, hal ini berarti apabila informasi dari informan sama dengan informasi informan sebelumnya dan itu dirasakan menyerupai maksud dari permasalahan yang diteliti, maka proses pengumpulan data dapat dihentikan. Penetapan informan di dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini berdasarkan kriterianya yaitu:

1. Informan Biasa Informan Biasa. Yang dimaksud dengan informan biasa dalam penelitian ini adalah orang/informan yang terlibat langsung dengan penelitian, dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah anggota keluarga penduduk yang bermukim di lereng Gunung Padang. Informan yang menetap disana merupakan warga asli dan pendatang. Alasan pemilihan kriteria ini adalah dengan mengetahui asal mereka dapat diperoleh informasi tentang alasan

mereka bermukim di Gunung Padang. Karena warga asli dan pendatang tentunya mempunyai alasan yang berbeda

2. Rumah milik sendiri maupun menyewa dan menetap disana. Alasannya pemilihan kriterianya dikarenakan jika informan tersebut sudah punya rumah atau menyewa rumah berarti informan telah merasakan menetap dan bermukim di Gunung Padang. Selain itu juga dapat diperoleh informasi apakah rumah-rumah tersebut sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Peneliti juga mencari informan kunci yang baru ditentukan ketika peneliti sudah mendapat kesimpulan pasti dari alasan keseluruhan informan. Yang dimaksud dengan informan kunci disini adalah orang/informan yang tidak terlibat langsung dengan penelitian tetapi mengetahui lebih banyak tentang masalah yang penulis cari. Disini peneliti mewawancarai dua informan kunci yang merupakan warga asli yang tahu seluk beluk permasalahan permukiman di Gunung Padang.
4. Pihak instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam tata ruang dan tata bangunan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan kota Padang yang merupakan instansi pemerintahan yang mengeluarkan peraturan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jumlah informan dalam penelitian ini dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jenis Informan	Keterangan
1.	Yohanes	Biasa	Lama domisili ± 13 tahun
2	Martalinus	Biasa	Lama domisili Sejak lahir
3.	Sudiarowaruwu	Biasa	Lama domisili ± 3 tahun
4.	Masconglase	Biasa	Lama domisili ± 10 tahun
5.	Syamsuri	Biasa	Lama domisili ± 30 tahun
6.	Slamet	Biasa	Lama domisili ± 30 tahun
7.	Sumitro	Biasa	Lama domisili ± 30 tahun
8.	Fangosara	Biasa	Lama domisili ± 13 tahun
9.	Syahbudin	Biasa	Lama domisili ± 27 tahun
10.	Ujang	Biasa	Lama domisili Sejak lahir
11.	Zulnedi	Biasa	Lama domisili Sejak lahir
12.	Putri Darsenilam	Kunci	Pemilik/yang berhak menguasai tanah kaum di Gunung Padang sekarang telah pindah ke Jakarta setelah sebelumnya tinggal di Cendana Mata Air
13.	Nurmidah	Kunci	Anak dari Sutan Gombok (orang pertama yang membuka ladang) tinggal di Cendana Mata Air
14.	Safar	Kunci	Orang yang berdomisili di Gunung Padang semenjak lahir dan mengetahui sejarah permukiman Gunung Padang, sekarang tinggal di RT IV
15.	Lili	Kunci	Staf Perencanaan Ruang Kota DTRTB kota Padang.

Sumber : Analisis Data 2011

1.6.3 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Lofland dan Loflan (1984:47) menyatakan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah kata-kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang nantinya akan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film (Moleong, 1998:112).

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan alat adalah benda yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Alat yang digunakan adalah tape recorder, alat tulis seperti pena dan kertas (Wahyu Pramono, 2002:52).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.

I. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan (Ritzer, 2004; 74).

Observasi atau pengamatan yang dilakukan karena akan mengoptimalkan kemampuan penelitian dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku sadar, pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihak peneliti maupun subyek penelitian. Pengamatan berguna untuk

penelitian yang melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian yang menanggapi arti fenomena dari sudut pandang atau panutan dari subyek (Moleong, 2004: 26).

Dalam penelitian ini, peneliti memberitahukan maksud penelitian kepada kelompok yang diteliti, cara observasi seperti ini disebut juga dengan *participant as observer* (Ritzer, 2004; 63).

Kegiatan observasi sudah peneliti lakukan sebelum membuat proposal setelah itu berlanjut ketika sudah mendapat izin ke lapangan. Peneliti tidak menentukan jadwal kapan akan melakukan observasi ke Gunung Padang. Tetapi biasanya peneliti datang ke sana pada siang hari sekitar pukul 10 pagi sampai pukul empat sore. Dari observasi yang telah dilakukan kira-kira jam 2 sampai jam 4 sore masyarakat yang bekerja sebagai nelayan telah pulang dari laut, dan suasana di lokasi permukiman baru terasa ramai sehingga peneliti dapat melihat perilaku masyarakat disana. Karena dijam-jam tersebut peneliti bisa menemukan banyak informan di lokasi penelitian. Awalnya peneliti hanya mengamati pola tingkah dan kebiasaan masyarakat pada jam-jam ketika itu mulai dari anak-anak SD yang sedang bermain di halaman mesjid sehabis pulang sekolah sambil bercengkrama dengan mereka dan tak jarang peneliti juga ditemani oleh beberapa anak ini ketika melakukan observasi.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan bagian yang sentral dalam penelitian. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang penting. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang (Taylor dalam Afrizal, 2005 : 44).

Wawancara mendalam dilakukan karena peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita apa saja yang diketahuinya tentang keberadaan permukiman mereka di daerah rawan bencana.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak berstruktur, artinya pewawancara bebas menanyakan berbagai hal kepada informan dan informan menjawab pertanyaan menurut apa yang mereka inginkan (Afrizal, 2005 : 44).

Wawancara ini dilakukan antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali (Afrizal, 2005 : 69). Berulang-ulang tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama, akan tetapi menanyakan hal-hal yang berbeda dan mengklasifikasikan informasi-informasi yang sudah didapat sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk menjangkau data sebanyak mungkin dengan cara berdialog langsung dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan penelitian.

Dalam hal ini yang telah peneliti wawancarai adalah masyarakat asli dan pendatang yang bermukim di Seberang Pabayan Gunung Padang, Informan kunci, dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan kota Padang. Wawancara yang bertipe *opened* dalam studi kasus adalah wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci untuk menanyakan opininya.

Wawancara dilakukan dengan cara pertemuan langsung dengan informan. Pertemuan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dari hasil percakapan dengan informan tersebut. Wawancara yang dilakukan bertujuan memperoleh data primer tentang keberadaan permukiman penduduk di Gunung Padang serta perilaku yang menjadi alasan mereka untuk bertahan di Gunung Padang. Wawancara dilakukan sesuai dengan kriteria informan dan pedoman wawancara yang selalu peneliti bawa.

3. *Mengumpulkan Dokumen serta Tulisan-tulisan*

Dokumen merupakan catatan atau tulisan-tulisan penulis secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah penulis itu sendiri. Kedudukan penulis dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Penulis disebut sebagai alat atau instrument penelitian disebabkan karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian (Moleong, 2004 : 168).

Penelitian penulis juga ditunjang dengan menggunakan alat-alat recording seperti : kamera digital dan mp3 player sebagai alat pengganti tape recorder. Alat-alat recording sangat membantu penulis untuk merekam informasi yang disampaikan informan saat wawancara sampai mengabadikan gambar yang menjadi bukti keberadaan permukiman penduduk di lereng Gunung Padang dan bukti penelitian penulis.

Tabel 1.2
Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber	Informasi yang Dikumpulkan
Primer	Observasi	RT 04 RW IV Seberang Pabayan Gunung Padang, Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan	Kondisi di lokasi permukiman, bentuk rumah dan permukiman, aktivitas, tindakan dan tingkahlaku masyarakat serta fasilitas apa saja yang ada disana.
		Masyarakat yang menetap di Gunung Padang	Kondisi sosial ekonomi penduduk di lereng Gunung Padang
	Wawancara	Informan kunci yaitu warga asli yang awal mula menetap disana.	Deskripsi permukiman penduduk di Gunung Padang
		Masyarakat dan Informan kunci	Alasan-alasan bertahannya keluarga yang bermukim di lereng Gunung Padang Gambaran tentang permukiman di waktu dulu
		Masyarakat	Pandangan masyarakat atas kebijakan pemerintah
		Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DTRTB) kota Padang	Perencanaan dan pengawasan permukiman serta peraturan dan persyaratan permukiman
		Masyarakat dan DTRTB	Ada atau tidaknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		Masyarakat dan informan kunci	Legalitas Tanah
Sekunder	Dokumentasi	DTRTB, buku, poster	Perda No.06 Tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		Skripsi, Buku, Koran, Internet	Penelitian terdahulu, Teori dan metode yang akan digunakan dalam penelitian, Keberadaan permukiman Gunung Padang

Sumber : Data Primer dan Sekunder 2012

1.6.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan lebih kurang selama lima bulan, terhitung dari mulai keluarnya SK Pembimbing pada bulan Juli sampai Desember 2011. Penelitian ini dibagi dalam dua tahap dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Tahapannya yaitu tahap observasi dan tahap wawancara mendalam, karena sebelum melakukan wawancara mendalam penulis melakukan observasi terlebih dahulu terhadap informan untuk memberikan gambaran perkembangan permukiman penduduk. Observasi ini dilakukan di daerah perbukitan Gunung Padang dengan berpura-pura sebagai pengunjung ke taman Siti Nurbaya. Hal ini dilakukan sebagai tahap awal agar penulis dapat dekat dengan informan tersebut.

Pada bulan Oktober penelitian sempat tertunda, hal ini dikarenakan pada bulan September penulis seminar proposal dan langsung jatuh sakit sehingga harus istirahat. Setelah itu penulis langsung mengurus segala persyaratan penelitian dan memusatkan kembali penelitian pada awal bulan November 2011. Awalnya penulis mendatangi kantor kelurahan dan menyampaikan maksud dan tujuan barulah ketika surat permohonan diproses penulis baru bisa meminta data dan semua hal yang penulis butuhkan. Karena memang penulis tidak terlalu mengenali lokasi penelitian jadi penulis berbincang-bincang dulu dengan orang yang bekerja di kelurahan. Setelah data dan informasi sudah diperoleh barulah pada awal bulan Desember menjadi awal mula penulis melakukan penelitian yaitu pada tanggal 1 Desember hari Kamis jam 10, pada hari pertama penulis pergi sendiri dengan modal survei dan keberanian, hasil yang didapat kurang memuaskan karena penulis kesulitan menentukan di daerah mana penulis bisa

mendapatkan informan yang telah penulis tetapkan. Pada waktu itu keadaan permukiman juga sepi, barulah ketika penulis melakukan observasi dan berjalan-jalan ke arah jalan masuk taman Siti Nurbaya penulis bertemu dengan informan pertama bernama Pak Ujang yang sedang berbincang dengan istrinya didepan rumah. Pada hari itu penulis hanya bisa mendapatkan tiga orang informan dikarenakan waktu yang terbatas dari informan yang sudah mendekati sore yang artinya informan tersebut harus mempersiapkan segala sesuatu untuk malam hari. Selain itu hape yang penulis gunakan sebagai alat perekam juga kehabisan batrai.

Penelitian ke dua penulis lakukan seminggu setelah itu tepatnya hari kamis tanggal 7 Desember, dikarenakan penulis harus pulang kampung karena orangtua sakit, pada hari itu penulis masih pergi sendiri karena penulis merasa jalan sendiri bisa membuat penulis bebas menentukan waktu pergi dan pulang tanpa ada gangguan dan kekhawatiran. Sayangnya pada hari itu penulis hanya mendapatkan 2 informan karena rumah dari salah satu informan tersebut berada jauh di atas kelerengan bukit, dan cukup membuat lelah mencapainya berhubung jalannya juga licin bekas hujan pada malam hari. Tetapi syukurlah penulis mendapatkan informan yang penulis cari. Sayangnya pada hari itu kedatangan penulis agak terlambat karena pagi-paginya terjadi pengrusakan oleh Satpol PP terhadap beberapa rumah penduduk yang ada di dekat pinggir batang air. Tetapi ternyata masyarakat lebih memilih membuka sendiri rumah mereka sehingga tidak ada pengrusakan dan pemaksaan oleh satpol PP. Barulah ketika selesai mewawancara informan pertama penulis mendapatkan informan ke dua yang merupakan warga

korban penggusuran yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara disela-sela istirahat mengeluarkan perabotan dari rumahnya.

Penelitian ke tiga penulis lakukan pada hari Minggu tanggal 11 Desember. Penulis memilih hari tersebut karena pada hari itu taman Siti Nurbaya ramai dikunjungi. Syukurlah hari itu hari yang sangat memuaskan karena penulis bisa mewawancarai sebanyak enam informan termasuk bertemu ketua RT untuk yang kesekian kalinya dan juga penulis mendapatkan keberadaan dari informan kunci. Pada hari itu penulis menemukan suka duka dalam mewawancara, karena dari keseluruhan informan yang diwawancarai ada sepasang informan suami istri bernama Sarimisa dan Fangoshara informan asal Nias yang tidak bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Minang, hingga akhirnya penulis sempat menunggu kedatangan anaknya dulu untuk dijadikan sebagai penterjemah. Kedua informan ini sudah berumur lanjut dan juga tidak pernah mengecap pendidikan hingga membuat mereka hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Nias, walaupun ibu Sarimisa cukup mengerti dengan bahasa yang penulis ucapkan tetapi untuk bicara beliau tidak bisa.

Setelah data yang didapat dari masyarakat Gunung Padang sudah jenuh kemudian penulis memfokuskan wawancara dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan pada hari Rabu tanggal 14 Desember dikarenakan surat permohonan penulis harus diproses dulu. Barulah ketika selesai mendapatkan data dan melakukan wawancara dengan staf perencanaan ruang kota penulis merasa masih banyak waktu untuk mengusahakan mencari keberadaan informan kunci karena penulis merasa belum puas jika belum mewawancara informan kunci tersebut.

Karena penulis bukan orang Padang sehingga tidak begitu mengetahui alamat yang diberitahu oleh ketua RT jadi penulis menanyakan dahulu kepada beberapa orang teman. Teman menyarankan agar penulis mengikuti angkot berwarna biru jurusan Pengambiran-Teluk Bayur akhirnya penulis pun tersesat karena ternyata angkot yang penulis ikuti masuk ke daerah pengambiran dulu hingga akhirnya kembali lagi ke jalan Bypass. Tetapi walaupun begitu penulis merasa harus melanjutkan karena kepalang tanggung sudah memulai.

Waktu itu sudah siang hari sekitar pukul 14:00, dan penulis berkeliling kota Padang selama tiga jam karena dari beberapa orang yang penulis tanya tidak menemukan dimana pastinya daerah yang penulis cari. Penulis merasa sangat kelelahan dan merasa tidak sanggup untuk meneruskan mencari dan berniat meneruskannya esok hari dengan meminta ditemani seorang teman, tetapi ketika kebingungan dan perasaan telah tersesat dan ragu jalan pulang, barulah ketika bertanya dengan masyarakat yang ada di tepi jalan penulis menemukan letak Cendana Mata Air dan syukurlah ketika memasuki daerah tersebut tidak terlalu susah menemukan rumah informan kunci. Hanya bertanya pada dua orang ibu penulis menemukan rumah dan keberadaan informan yang penulis cari.

Walaupun informan kunci tidak berhasil diwawancarai dikarenakan akan bepergian akhirnya penulis berbincang-bincang dengan salah satu ibu yang menunjukkan rumah dan wajah informan tersebut dengan menjelaskan maksud dan tujuan penulis. Diluar dugaan ternyata penulis bertanya dengan orang yang tepat karena ternyata ibu tersebut adalah saudara bako dari informan sehingga akhirnya beliau lah yang penulis wawancara. Barulah satu minggu setelah itu

penulis bisa mewawancarai informan yang penulis cari. Tepatnya pada tanggal 20 Desember 2011.

Karena ketika melakukan wawancara informan kunci ke dua menyarankan untuk menemui seorang sahabatnya yang merupakan warga Gunung Padang bernama pak Safar akhirnya penulis kembali lagi untuk yang terakhir kalinya ke Gunung Padang untuk melakukan wawancara dengan beliau sekalian melengkapi data-data yang kurang setelah perbaikan tepatnya tanggal 31 Desember 2011.

Pada saat observasi di lapangan penulis juga ditemani oleh Hasnah Hafidzah Lestari yang sudah penulis anggap sebagai adik kandung, Imelda Ifui yang merupakan adik kos, dan Feni Lizarti yang merupakan teman diorganisasi yang juga ikut membantu dalam penelitian ini sehingga penulis mempunyai keberanian pada saat di lapangan dan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, penulis juga selalu membawa surat penelitian yang telah diketahui oleh Kesbangpol, untuk “berjaga-jaga” ketika ada warga yang tidak percaya akan maksud kedatangan penulis.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisis data. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah keluarga yang terdiri dari beberapa individu. Dalam penelitian ini unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah keluarga dengan sumber data anggota

keluarga yang bermukim di Seberang Pabayan Gunung Padang. Bila suami tidak berada di tempat ketika wawancara dilakukan, maka dilakukan wawancara dengan istri.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas yang terus menerus dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori (Spradley,1997:117-119, Afrizal,2005:54).

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat dilapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field Note*). Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Agar data informasi yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif, analisis data ini menggunakan teknik triangulasi (*chek and recheck*). Artinya pertanyaan yang diajukan merupakan pemeriksaan kembali atas kebenaran jawaban yang didapat dari informan, ditambah berbagai pertanyaan yang bersifat melengkapi untuk menarik

kesimpulan atau verifikasi, yaitu menguji kesimpulan data dari berbagai keabsahan. Triangulasi dapat berarti adanya informasi-informasi yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda (Afrizal, 2005 : 62).

Analisis dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan etik dan emik. Pendekatan *etik* yaitu penulis dalam menarik kesimpulan dari hasil temuan datanya didasarkan atas konsep yang dipakai oleh penulis itu sendiri. Sedangkan pendekatan *emik* adalah penulis dalam menarik kesimpulan dari hasil temuan datanya dilapangan didasarkan atas konsep yang dipakai oleh informan penelitiannya.

Menurut Moleong (1988 : 53), dalam pendekatan etik, penulis menyusun sistem kategori yang logis, cara pengelompokan, dan satuan-satuan tanpa mempedulikan struktur yang ada dalam bahasa perseorangan. Sedangkan pendekatan emik merupakan usaha untuk mengungkapkan dan menguraikan pola suatu bahasa atau kebudayaan tertentu, dari cara dan unsur-unsur bahasa serta kebudayaan yang berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan fungsi sesuai dengan pola tersebut.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menghuni perbukitan Gunung Padang RT.04 RW.IV Seberang Pabayan Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan. Peneliti memilih kampung Seberang Pabayan sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut ditempati oleh

masyarakat yang khusus menghuni kawasan Gunung Padang yang merupakan salah satu titik kawasan yang rawan bencana seperti longsor. Ditambah lagi lokasi ini dekat dengan pantai Padang dan merupakan kawasan hutan lindung kota Padang dengan adanya objek wisata disana. Selain alasan di atas juga ada alasan lainnya seperti resiko rawan bencana di RT ini lebih tinggi karena di RT lain tidak terlalu dekat dengan laut. Kondisi perumahan maupun latar belakang penduduknya juga relatif lebih heterogen. Artinya kondisi rumah ada yang non permanen, semi permanen, dan permanen. Beserta kepemilikan rumah ada yang milik pribadi dan ada yang menyewa dengan latar belakang keluarga berbeda dengan berbagai etnis seperti pribumi, Nias, Jawa, Bangka, Aceh dan lain-lain. Semua kriteria ini sesuai dengan kriteria yang penulis cari.

1.6.8 Definisi Operasional

- Alasan merupakan suatu dasar, hakikat, dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalan,perkiraan dsb), yang menjadi pendorong (untuk berbuat). Alasan adalah suatu dorongan atau hal dasar yang dimiliki individu sehingga mereka mau atau tidak mau melaksanakan suatu tindakan tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, bahaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Bermukim yaitu orang yang tetap tinggal , tempat tinggal, kediaman, kawasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

- Bertahan adalah tetap pada tempatnya (kedudukannya), tidak beranjak, mempertahankan diri, tidak mau menyerah, berteguh hati, berkeras hati (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

- Kawasan rawan longsor merupakan kawasan dengan kemiringan curam dengan struktur batuan yang tidak stabil dan memiliki curah hujan tinggi
<http://bappeda.go.id>

- Rawan yaitu mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya, gawat (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan:

- Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

- Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- Perumahan dan kawasan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

- Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
- Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- Kota adalah Permukiman berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi; tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama di suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis. (Kamus Tata Ruang)
- Perkotaan adalah permukiman dan lokasi kerja yang padat, besar dan permanen yang dihuni oleh penduduk yang heterogen dan kosmopolitan. Akibatnya menjadi longgar (*impersonal relation*). Heterogen adalah penduduk yang berasal dari berbagai etnis yang berbeda dalam suatu negara (Abbas, 2002:9).
- Urbanisasi adalah perubahan keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula berdominan di perdesaan menjadi dominan di

daerah perkotaan atau pertambahan penduduk kota akibat migrasi penduduk dari desa ke kota (Kamus Tata Ruang, 1997:112).

Urbanisasi adalah masyarakat yang awalnya bersifat homogen berkembang dan berubah sedemikian rupa sehingga kawasan dan pola hidup masyarakatnya bersifat heterogen dan suatu proses terbentuknya ciri-ciri kota yang kompleks yang disebabkan karena perpindahan penduduk (migrasi) dari suatu daerah yang bersifat homogen (dapat desa atau kota kecil) menuju daerah yang lebih bersifat heterogen (kota) (Hariyono, 2007:93-94).

1.6.9 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2.
Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Tahun 2011									
	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	
Survai Awal	■									
Penyerahan TOR		■								
Rapat Jurusan			■							
SK Pembimbing dikeluarkan			■							
Bimbingan Proposal				■						
Seminar Proposal					■					
Perbaikan Proposal						■				
Penelitian Lapangan							■	■		
Analisa Data dan Bimbingan Skripsi								■	■	■
Rencana Skripsi									■	

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2.1 Deskripsi Kota Padang

Kota Padang adalah ibu kota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ} 44' 00''$ sampai $1^{\circ} 08' 35''$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ} 05' 05''$ dan $100^{\circ} 34' 09''$ Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980 Luas Kota Padang $694,96 \text{ km}^2$ atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan ketinggian 2 meter dari permukaan laut. Seperti daerah Indonesia lainnya Kota Padang juga merupakan daerah yang beriklim tropis.

Secara topografi Kota Padang dibagi atas 2 bagian yaitu daerah datar dan daerah landai yang juga daerah perbukitan. Daerah landai dan datar terletak disebelah pantai barat, sedangkan daerah yang berbukit-bukit terletak di bagian timur dan selatan. Sebagian besar Kota Padang atau 51,01% berupa hutan yang dilindungi pemerintah, yaitu berupa pekarangan/bangunan seluas $62,88 \text{ km}^2$ atau 9,05%, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas $52,25 \text{ km}^2$ atau 7,52%. Kota Padang mempunyai garis pantai sepanjang 84 km, serta mempunyai 17 buah pulau yang terbesar pada 4 kecamatan, yaitu 8 buah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, 5 buah pulau di daerah Padang Selatan, 2 buah pulau di Padang Barat dan 2 buah pulau di Koto Tangah.

Dari keseluruhan luas kota padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan pekarangan seluas 51,08 km² atau 7,35 persen

Dari segi administratif, Kota Padang mempunyai batas daerah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok.

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur, Koto Tangah, Pauh, Kuranji, Nanggalo, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Bungus Teluk Kabung. Dari 11 kecamatan ini terdapat 193 kelurahan, jumlah kelurahan ini sebelum otonomi daerah dan setelah adanya otonomi daerah ditetapkan menjadi 103 kelurahan. Pada tahun 2009, penduduk Kota Padang telah mencapai 875.750 jiwa, meningkat dari jumlah 819.740 jiwa dari tahun 2006 (BPS Kota Padang, 2009).

Kota Padang merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera oleh karena itu Kota Padang termasuk ke dalam kota pemerintahan, kota pendidikan dan kota perdagangan. Dengan bertambahnya kemajuan zaman seperti sekarang menyebabkan banyak kebudayaan yang juga ikut mempengaruhi penduduk Kota Padang, baik itu dalam segi ekonomi maupun sosial dan untuk tetap menjaga

kestabilan masyarakat maka dikeluarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2.2. Deskripsi Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan

2.2.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Padang Selatan mempunyai luas daerah 10,03 km² atau 1,44% dengan tinggi daerah dengan permukaan laut 0-322 meter dpl. Jumlah penduduk mencapai 54.012 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak di kelurahan Mata Air yaitu 10.293 jiwa. Padang Selatan mempunyai ibukota kecamatan Mata Air dan jumlah kelurahan di kecamatan Padang Selatan sebanyak 12 kelurahan. Batang Arau merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Padang Selatan dengan luas nagari 0,34 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Padang Barat

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kelurahan Bukit gado-

KECAMATAN PADANG SELATAN



Gambar 2.1 Skeisa Kelurahan Kecamatan Padang Selatan

2.2.2 Penduduk

Dari hasil sensus Kelurahan Batang Arau 2010 kelurahan ini mempunyai jumlah penduduk 4.511 orang dengan komposisi 2.245 orang laki-laki dan 2.266 orang perempuan. Dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk di bawah ini

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Batang Arau

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Jumlah Penduduk	4.511
2.	Jumlah Penduduk Laki-Laki	2.245
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	2.266

Sumber: Kantor Kelurahan Batang Arau 2010

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	TK	256
2.	Sekolah Dasar	810
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	805
4.	Sekolah lanjutan Tingkat Atas	816
5.	Perguruan Tinggi	43
6.	Sarjana/ S1-S2	2
	Jumlah	2732

Sumber: Kantor Kelurahan Batang Arau 2010

2.2.3 Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan di Kelurahan Batang Arau kurang bagus. Ini dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan yang sulit di jangkau, dimana di kelurahan tersebut hanya ada 1 Taman Kanak-kanak dan 2 SD sedangkan SMP dan SMA ada di kelurahan lain.

2.2.4 Mata Pencaharian Penduduk

Masyarakat Kelurahan Batang Arau pada umumnya bermata pencarian swasta. Selain itu mereka juga banyak yang menjadi nelayan, pedagang, petani, Pegawai negeri / swasta, ABRI / Polisi, dan buruh. Tetapi banyak juga yang masih pengangguran. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Tani	16
2	Dagang	325
3	Nelayan	427
4	Swasta	514
5	Buruh	423
6	Pegawai Negeri Sipil	53
7	TNI/POLRI	12
8	Pengangguran	429
9	Lain-lain	15
	Jumlah	2214

Sumber: Kantor Kelurahan Batang Arau 2010

2.2.5 Agama

Masyarakat Kelurahan Batang Arau pada umumnya menganut agama Islam yaitu sebanyak 3.949 orang, tetapi ada juga yang menganut agama Kristen dan Budha. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	3.949
2	Katolik	277
3	Protestan	177
4	Hindu	-
5	Budha	108
	Jumlah	4511

Sumber: Kantor Kelurahan Batang Arau 2010

2.2.6 Mobilitas Sosial

Tingkat kematian dan kelahiran penduduk dimana bayi yang lahir pada tahun 2010 sebanyak 11 orang. Sedangkan angka kematian sedikit lebih banyak yaitu 14 orang. Untuk jumlah penduduk yang masuk ke kelurahan ini sebanyak 24 orang sedangkan penduduk yang keluar atau pergi tidak ada. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 2.5 Mobilitas Penduduk

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Lahir	7	4	11
2.	Meninggal Dunia	9	5	14
3.	Penduduk Datang	14	10	24
4.	Penduduk Pergi	-	-	-

Sumber: Kantor Kelurahan Batang Arau 2010

2.2.7 Sarana Sosial

Di Kelurahan Batang Arau terdapat sarana kesehatan seperti posyandu sebanyak 10 unit dan polindes sebanyak 1 unit. Sedangkan untuk sarana pendidikan ada PAUD 2 unit, TK 1 unit dan SD 2 unit. Untuk SMP dan SMA tidak ada di kelurahan ini. Selain itu juga terdapat sarana peribadatan seperti mesjid 3 unit, mushalla 3 dan 1 unit gereja. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Posyandu	10 unit
2.	Polindes	1 unit
	Jumlah	11 unit

Sumber: Kantor Kelurahan Batang Arau 2010

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	PAUD	2 unit
2	TK	1 unit
3.	SD	2 unit
	Jumlah	5 unit

Sumber: Kantor Kelurahan Batang Arau 2010

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Mesjid	3 unit
2	Mushalla	3 unit
3.	Gereja	1 unit
	Jumlah	7 unit

Sumber: Kantor Kelurahan Batang Arau 2011



2.3 Gambaran Gunung Padang

RT 04 RW IV Seberang Pabayan merupakan daerah yang terdapat di kawasan Gunung Padang kecamatan Padang Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Padang Barat

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Pangalangan

Daerah ini merupakan kawasan hutan lindung yang direncanakan oleh pemerintah kota Padang sebagai kawasan wisata terpadu. Hal itu terlihat dengan banyaknya pembangunan pengembangan objek wisata taman Siti Nurbaya. Disini juga terdapat Sungai Arau dengan panjang 5,00 km yang berawal dari muara tak jauh dari permukiman penduduk, sehingga memudahkan nelayan ketika melaut, karena muara ini tidak terlalu menjorok ke laut dan dilindungi oleh perbukitan.

Tidak ada yang tahu pasti sejarah dari Gunung Padang maupun tentang daerah yang bernama Seberang Pabayan ini. Ada yang bilang legenda Siti Nurbaya lahir disini dengan adanya makam sekaligus dijadikan sebagai objek wisata Taman Siti Nurbaya di puncak bukit. Tetapi kepastian kebenaran itu masih dalam tanda tanya. Begitupun dengan arti dari nama Seberang Pabayan. Ada yang bilang Pabayan berasal dari kata palabuhan dikarenakan orang Minang dulunya tidak lurus berbahasa jadi kata palabuhan berubah jadi pabayan. Dan ada juga

yang mengatakan pabayan itu berasal dari kata 'pambayan' misalnya suami dari mantan pacar atau suami dari mantan istri. Hal ini mungkin dapat dimengerti bahwasanya masyarakat disini berumah tangga masih dalam lingkup sekampung atau masih bertetangga.

Informasi dari ketua RT didapat bahwa di Seberang Pabayan terdapat 76 kepala keluarga yang menghuni rumah-rumah yang pada umumnya dibangun di atas kelerengan bukit, jika dilihat dari bawah terlihat seperti bangunan rumah bertingkat yang tersusun mengikuti tingkat kemiringan lahan. Gunung Padang merupakan salah satu objek pariwisata yang ramai dikunjungi apalagi ketika libur sekolah dan hari minggu, dengan pemandangan yang begitu indah mulai dari lereng bukit yang dibuat berjenjang semen, dan menikmati pemandangan kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal besar yang menyeberangkan wisatawan melewati batang arau menuju pantai muara dan pulau pisang.

Perpaduan warna bening dan biru air laut menjadi suatu pemandangan yang menyejukan. Belum lagi posisi pulau-pulau kecil ditengah laut. Keindahan itulah yang dilihat dari atas Bukit Siti Nurbaya. Selain itu di perbukitan ini juga banyak terdapat bunker-bunker tua peninggalan zaman Belanda dan Jepang sehingga Gunung Padang bisa juga dijadikan wisata sejarah. Gunung Padang begitu asri dan ditumbuhi beragam pohon seperti yang diketahui Gunung Padang merupakan kawasan hutan lindung namun kenyataannya sekarang ini Gunung Padang tidak seperti dulu lagi, Gunung Padang sekarang sudah subur ditumbuhi oleh permukiman ilegal.

Dikawasan lereng Gunung Padang ini dihuni oleh berbagai etnis seperti penduduk pribumi atau lahir dan besar disana, asli Nias, luar daerah dan ada juga yang berasal dari luar Sumbar seperti Jawa. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan, buruh kapal, buruh bangunan, dan juga banyak yang bekerja disektor informal seperti berdagang kecil-kecilan di pinggir batang arau. Bangunan tempat tinggal masyarakat disini sudah berstatus rumah milik sendiri dengan kondisi rumah non permanen, semi permanen dan permanen.

2.4 Deskripsi Permukiman Penduduk di Lereng Gunung Padang

2.4.1 Sejarah Permukiman Penduduk di Lereng Gunung Padang

Awalnya tidak ada yang tahu pasti sejak kapan perbukitan Gunung Padang ini mulai dibuka untuk permukiman. Karena dari informan yang berdomisili disana baik yang mengaku sebagai warga asli maupun pendatang tidak ada yang tahu pasti tahun keberadaan nenek moyang mereka, dan siapa yang pertama kali membuka lahan disini. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsuri (47 tahun, nelayan):

“...apak awak Jawa amak Bukiktinggi tapi awak lahia disiko...”
(“...Bapak saya asli Jawa ibu asli Bukiktinggi...” (wawancara 11 Desember 2011)

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan tiga informan kunci yang merupakan warga asli Gunung Padang. Dahulunya mereka pernah tinggal di kawasan kaki Gunung Padang tepatnya di tepi Batang Arau. Waktu itu mereka tinggal disana hanya untuk bertani dan membuka ladang di daerah perbukitan,

itupun hanya berani membuat pondok-pondok kecil. Tetapi ketika ada pengusuran besar-besaran oleh pemerintah dengan alasan rawan banjir kira-kira ± 20 tahun lalu mereka terpaksa pindah ke daerah Cendana Mata Air. Mereka adalah wanita usia hampir mendekati 70 tahun, dimana menurut penuturan mereka orangtua mereka merupakan orang pertama yang membuka ladang di Gunung Padang. Wanita pertama yang berhasil diwawancara adalah ibu Nurmidah (67 tahun). Menurut penuturan ibu Nurmidah, dahulunya permukiman disana tidak seperti sekarang ini. Waktu itu masyarakat hanya berani membuat rumah di tepi sungai batang Arau dan agak jauh dari kaki bukit:

"...Dulunyo indak sarupo itu, kami indak talok mambuek rumah di lereng bukit tu do, kami mambuek pondok di tapi batang aia tu nyo, dulunyo kami baladang disitu ndak bara nan pai malauik do, tapi kini disitu lah rami bana. Kabanyakan urang pelarian..."

("...Dahulu tidak seperti itu, kami tidak berani membuat rumah di lereng bukit. Kami hanya membuat pondok ditepi batang air, dulunya kami berladang disana tidak berapa orang yang pergi melaut, tetapi sekarang disana sudah ramai sekali. Kebanyakan orang pelarian..."(wawancara 14 Desember 2011).

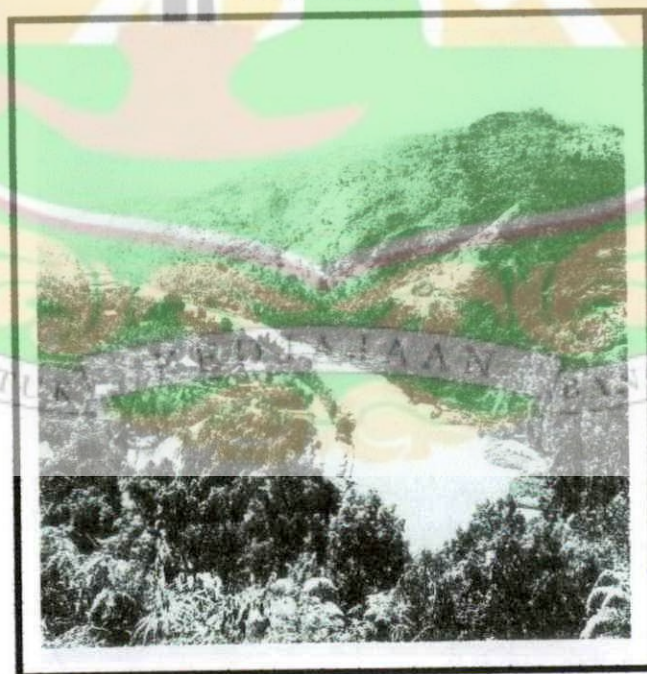
Ibu Nurmidah mengatakan yang dimaksud dengan "orang pelarian" adalah orang yang tidak diterima maupun tidak sanggup hidup di tempat yang lebih datar, karena adanya berbagai masalah seperti dikucilkan dari masyarakat, sering dianggap orang asing karena asal usul maupun status sosial mereka.

Seperti pernah diungkapkan juga oleh informan Yurlina (Butet) 26 tahun, ibu rumah tangga asal Nias:

“...kami pernah tinggal di Palinggam, disana kami seperti dianggap hina bahkan oleh orang yang punya kontrakan, kami tidak tau salah kami apa sampai masih 3 bulan lagi habis kontrakan, dia sudah minta lagi uang kontrakan kepada kami...” (wawancara 7 Desember 2011)



Gambar 2.2 Gunung Padang Dilihat dari Kawasan Kuburan Cina Pada Masa Lalu



Gambar 2.3 Kondisi Batang Arau Diwaktu Dulu Dilihat Dari Arah Gunung Padang



Sumber : Buku

Gambar 2.4 Gambar Kawasan Gunung Padang dan Batang Arau Saat Itu

Ibu Nurmidah mengatakan setelah digusur mereka menetap di banyak tempat dan baru membeli tanah dan membuat rumah di Cendana. Tetapi ketika mereka sudah membuat rumah barulah banyak berdatangan orang dari luar yang kebanyakan katanya orang-orang pelarian. Beliau juga mengatakan bahwa warga asli tidak banyak yang menjadi nelayan walaupun menangkap ikan hanya untuk pekerjaan sampingan, dan menurutnya orang pendatanglah yang banyak menjadi nelayan.

“...urang asli nan punyo tanah di situ diusir, tapi kini banyak urang nan datang nan kalamak ati nyo se mamakai tanah...”

“(...orang asli yang punya tanah disana diusir, tetapi sekarang banyak orang pendatang yang seenak hatinya saja memakai tanah. Kalau pergi membersihkan kuburan kesana dianggap orang pendatang padahal kitalah awal mula disana....” (wawancara 14 Desember 2011).

Sejalan dengan penuturan Putri Nurma diatas Rais dalam Colombijn juga mengatakan bahwa permukiman liar adalah gejala yang berkaitan dengan kedatangan kaum pendatang secara besar-besaran setelah kemerdekaan. Saya menganggap sebagian besar pemukim liar adalah para pendatang yang tidak memiliki keluarga untuk tempat menumpang (Colombijn, 2006:238).

Ibu Nurmidah mengatakan bahwa orang pendatang tersebut awalnya hanya berjanji membangun rumah-rumah kecil. Dengan harga sewa murah terkadang dengan harga cuma-cuma. Tuan tanah tidak mau menjual tanah tersebut karena merupakan tanah ulayat.

"...nyo awalnyo bajaranji mambuek pondok-pondok keteknyo, kironyo lamo ka lamoan nyo baoklah sanak-sanaknyo dari kampuang, tu baranak-ranak lah disitu a nyo bangun se rumah alah nyo bangun baru nyo mangecek, kironyo gadang-gadang rumah dibueknyo..."

("...mereka awalnya berjanji membuat rumah-rumah kecil, ternyata lama kelamaan mereka membawa sanak saudara dari kampung sampai beranak cucu disana. Lalu mereka bangun saja rumah, setelah rumah dibangun baru mereka bilang sama ibu, ternyata mereka membangun rumah yang besar-besar..."(wawancara 14 Desember 2011)

Penjelasan Ibu Nurmidah juga dibenarkan oleh informan ke dua yang berhasil diwawancarai yaitu bernama Putri Darsenilam yang biasa dipanggil dengan ibu I (67 Tahun):

"...Angku ibu namonyo Sutan Gombok mamak dek anduang ibu, a anduang ibu barampek badunsanak. Jadi inyiak ibuk tu dulunyo nan manguasai Gunung Padang tu kiro-kiro sabalun tahun 25 an angku ibu alah disitu. Kami baladang cangkeh di ateh bukit tu dulu..."

("...angku ibu namanya Sutan Gombok, mamaknya ibu kandung ibu. Ibunya ibu empat bersaudara. Jadi kakek ibu itu dulunya yang menguasai Gunung Padang kira-kira sebelum tahun 1900 kakek ibu sudah ada disana.

Kami berladang cengkeh di atas bukit itu..."(wawancara 20 Desember 2011)

Ibu I mengatakan warga asli hanya tinggal satu-satu disana, karena lebih kurang 20 tahun lalu mereka digusur dari Gunung Padang. Barulah pada tahun 1995 ibu I membeli tanah di Mata Air. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bakonya ibu Nurmidah, penduduk asli tidak ada yang menjadi nelayan hanya penduduk pendatanglah yang bekerja sebagai nelayan.

Selanjutnya informan kunci ke tiga bernama bapak Safar (62 tahun). Infroman yang sudah berdomisili selama tiga keturunan di Gunung Padang. Tetapi sejak penggusuran bersama dengan ibu I tahun 1990-an lalu beliau pindah ke lereng belakang bukit menghadap arah pantai Air Manis.

"...disiko ko nan warga asli indak bara lai do, memang warga pandatang nan banyak. Dulunyo apak si Nurmidah tuan Gombok mambuka ladang disiko. Satalah paninggalan Sutan Gombok bakuasolah duo urang, sabalah utaro Sutan Rusik, sabalah salatan sutan Khaidir, urang ko kamanakan Sutan Gombok. Barulah katiko maningga pulo urang nan duo ko jatuah ka Putri Nurma mandehnyo ibu I..."

(...disini warga asli tidak berapa, memang warga pendatang yang banyak. Dahulunya bapak si Nurmidah tuan Gombok membuka disini. Setelah peninggalan Sultan Gombok berkuasalah dua orang, sebelah utara Sultan Rusik, sebelah selatan Sultan Khaidir, mereka ini adalah kemenakan Sultan Gombok. Barulah ketika meninggal dua orang ini warisan jatuh ke tangan Putri Nurma ibunya ibu I..." (wawancara 31 Desember 2011).

Dilihat melalui literatur yang ada tentang Gunung Padang, dalam Paco-paco Kota Padang Freek Colombijn juga menemukan fakta sejarah dimana dahulunya Gunung Padang yang bernama Gunung Monyet merupakan tanah ulayat dan warga pendatang hanya mendapat hak guna atas tanah. Karena menurut hukum adat Minangkabau tanah itu tidak dapat dijual kepada orang

Belanda, Cina maupun Jawa atau warga pendatang. Dahulunya juga ditemukan fakta sejarah bahwa Batang Arau merupakan dermaga pertama jauh sebelum pelabuhan Teluk Bayur dibuka, sehingga dermaga batang arau sangat ramai dikunjungi (Colombijn, 2006).

Sayangnya dari penuturan ke tiga informan kunci saksi sejarah di atas tidak ada yang tahu pasti tahun berapa awal kedatangan Sultan Gombok (penguasa pertama) ke Gunung Padang. Hal itu mungkin dikarenakan belum adanya kalender maupun alat penghitungan lainnya. Tetapi hal tersebut bisa dianalisa dengan kilas balik dari penuturan informan kunci dimana kira-kira ± 20 tahun lalu (berkisar antara tahun 1992-1994) mereka digusur dari Gunung Padang setelah semenjak lahir mereka menetap disana. Ibu I adalah anak dari Putri Nurma yang seumuran dengan Nurmidah. Putri Nurma adalah kemenakan dari tuan tanah pertama (yang pertama kali membuka ladang). Ibu I saat ini berumur 67 tahun, anggap ibunya Putri Nurma jika masih hidup berumur 97 tahun dan karena ia anak ke empat anggap jarak umurnya dengan Sultan Gombok berkisar antara 12 sampai 15 tahun jadi Gunung Padang sudah dihuni semenjak abad ke-19 yaitu antara rentang waktu tahun 1890-1899.

Padang merana di bawah kekuasaan VOC tetapi bangkit dari kelesuan pada masa pemerintahan peralihan Inggris dan dimulainya budidaya kopi tidak lama setelah tahun 1800. Sejak itu populasi dan wilayah Padang berkembang (Colombijn, 2006:89)

BAB III

ALASAN-ALASAN BERTAHANNYA KELUARGA YANG BERMUKIM DI DAERAH RAWAN BENCANA LERENG GUNUNG PADANG KECAMATAN PADANG SELATAN

Bab ini berisi pembahasan temuan dan analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung yaitu berupa informasi yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Data dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk uraian kata-kata, pendapat dan informasi yang lebih rinci sesuai dengan masalah penelitian yang dibagi menjadi empat topik permasalahan dan dipecahkan menjadi beberapa sub topik. Topik permasalahannya yaitu:

3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Lereng Gunung Padang

3.1.1 Identitas Informan

Berdasarkan hasil penelitian maka identitas dari informan penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu informan kunci dan informan biasa untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Informan Kunci

No.	Informan	Umur	Status	Keterangan
1.	Putri Darsenilam	67 tahun	Janda	Pemilik/yang berhak menguasai tanah kaum di Gunung Padang
2.	Nurmidah	67 tahun	Janda	Anak dari Sutan Gombok (orang pertama yang membuka ladang)
3.	Safar	62 tahun	Menikah	Orang yang berdomisili di Gunung Padang semenjak lahir dan mengetahui sejarah permukiman Gunung Padang
4.	Lili	35 tahun	Menikah	Staf Perencanaan Ruang Kota DTRTB kota Padang.

Sumber : Analisis Data 2011

Identitas informan biasa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Identitas Informan Biasa

No	Informan	Umur		Pendid. Terakhir	Jumlah anak	Asal	Lama Domisili
		Suami	Istri				
1.	Yohanes dan Rini	35 tahun	29 tahun	SD	3 orang	Nias, Palinggam	13 tahun
2.	Martalinus dan Desriani	40 tahun	39 tahun	SMP	5 orang	Gunung Padang	Lahir dan Tinggal di Gunung Padang
3.	Sudiarowaruwu dan Yurlina	39 tahun	26 tahun	SMP, SD	1 orang	Nias	± 3 tahun
4.	Masconglase dan Anilase	35 tahun	32 tahun	SD	1 orang	Nias	±10 tahun
5.	Syamsuri dan Febrianingsih	47 tahun	43 tahun	SMP, SD	3 orang	Bukittinggi Tasikmalaya	± 30 tahun
6.	Slamet dan Mila	45 tahun	25 tahun	SMP, SD	3 orang	Jawa, Bukittinggi	± 30 tahun
7.	Sumitro dan Sukanti	49 tahun	49 tahun	SMP, SMA	4 orang	Tasikmalaya Muaro Bungo	± 30 tahun
8.	Fangosara dan Sarimisa	57 tahun	55 tahun	-	-	Nias	± 13 tahun
9.	Syahbudin dan Srimainah	68 tahun	57 tahun	SD	3 orang	Bangka belitung, Jawa	± 27 tahun
10.	Ujang dan Ani	45 tahun	30 tahun	SMP	3 orang	Gunung Padang	Lahir dan Tinggal di Gunung Padang
11.	Zulnedi dan Sumitra	48 tahun	45 tahun	SMP	2 orang	Gunung Padang	Lahir dan tinggal di Gunung Padang

Sumber : Analisis Data 2011

Dilihat dari tabel di atas, jika dilihat dari segi umur informan biasa berkisar antara 20 – 68 tahun, umur suami lebih tua dari istri. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan dan umur mereka sebanyak 10 orang masih produktif dengan pendidikan terakhir rata-rata hanya sampai jenjang SMP dan dua orang informan

yang tidak pernah bersekolah yaitu pasangan informan Sarimisa dan Fangosara yang merupakan informan buta huruf dan tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Minang karena mereka berasal dari Nias. Keterbatasan ilmu terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti faktor keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Keluarga sebagai lingkungan sosial yang pertama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan intelegensi seseorang. Seorang anak yang hidup dalam keluarga yang memperhatikan tumbuh kembang anaknya pasti sangat memikirkan pendidikan untuk anak-anaknya kelak. Walau apapun kendala yang akan dihadapi sekalipun dalam keterbatasan ekonomi. Yang terjadi pada masyarakat di Seberang Pabayan demikianlah adanya. Rendahnya pendidikan berdampak kepada mata pencaharian mereka yang kebanyakan tidak terlalu menuntut pengetahuan dan pengalaman. Hal ini diketahui dari banyaknya informan yang telah didapat paling tinggi mereka hanya sampai pada jenjang SMP.

Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah berkisar antara 3-7 orang. Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 9 keluarga merupakan warga pendatang yang berasal dari luar kota Padang seperti Nias, Jawa, Bukittinggi, Pasaman, Bangka Belitung dan 3 orang lagi adalah warga asli Gunung Padang yang artinya lahir dan menetap di lokasi tersebut.

Keseluruhan data di atas dapat diinterpretasikan bahwa informan yang paling banyak bermukim di lereng Gunung Padang adalah informan pendatang

seperti diungkapkan oleh ketua RT Zulnedi (48 tahun) bahwa penduduk pendatang lebih banyak dari penduduk asli.

“...perimbangan antaro warga asli samo pendatang kiro-kiro 40% warga asli Gunuang Padang, 60% lai warga pendatang, memang warga asli saketek tingga lai nyo...”

(...perimbangan antara warga asli dengan pendatang kira-kira 40% warga asli Gunuang Padang, dan 60% lagi warga pendatang memang warga asli tinggal sedikit...) (wawancara 31 Desember 2011)

Dari penuturan ketua RT tersebut artinya fenomena urbanisasi sudah dapat dilihat dari data tersebut. Kaum pendatang atau migran lebih banyak datang ke Gunung Padang sehingga mobilitas penduduk yang datang lebih tinggi daripada penduduk yang pergi antara rentang waktu dari tahun 1999-2011 (dilihat dari lama domisili informan pendatang). Ada faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) yang membuat informan pendatang tersebut melakukan urbanisasi. Seperti kondisi ekonomi di desa yang tidak menguntungkan, maupun adanya anggapan dengan merantau ke kota Padang nasib mereka bisa lebih baik. Seperti yang dipertanyakan oleh Nasikun tentang pandangan dari kebanyakan teori yang menyatakan bahwa over-urbanisasi lebih banyak disebabkan karena desa sudah tidak menjadi sumber hidup lagi. Menurutnya, over urbanisasi juga disebabkan oleh karena kota sangat menarik dan daya serap tenaga kerjanya sangat besar. (Nasikun dalam Abbas, 2005:48).

3.1.2 Kondisi Ekonomi

Informan berdasarkan kondisi ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi Informan

No	Informan	Pekerjaan	Pendapatan /Bulan	Sarana Kendaraan Yang Dimiliki	
				Motor	Jenis Kapal
1.	Yohanes	Petani Tuak	±Rp.1.800.000,-	Jupiter 2008	-
2.	Martalinus	Nelayan	±Rp.1.500.000,-	Vega R 2009	Sampan
3.	Sudiarowaruwu	Buruh Bangunan	±Rp.2.400.000,-	KTM 2007	-
4.	Masconglase	Buruh	Rp. 1.200.000,-	-	-
5.	Syamsuri	Nelayan	±Rp.1.500.000,-	Honda Revo 2008	Sampan
6.	Slamet	Nelayan	±Rp.1.500.000,-	-	Sampan
7.	Sumitro	Tukang POS	±Rp.2.000.000,-	Motor POS	-
8.	Fangosara	Pemulung, Buruh	±Rp.500.000,-	-	-
9.	Syahbudin	Pemulung, Nelayan, Petani	±Rp.500.000 belum termasuk hasil pertanian	Vixion 2011	Sampan
10.	Ujang	Nelayan	±Rp.1.500.000	-	Sampan
11.	Zulnedi	Ketua RT, petani	±Rp.1.000.000,-	Supra X 2006	-

Sumber : Analisis Data 2011

Dari tabel di atas dilihat bahwa kehidupan ekonomi keluarga dapat digolongkan ke dalam kelas menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang ditekuni beserta penghasilan yang didapat oleh informan, dimana untuk besar penghasilan para informan banyak yang mematok penghasilan per hari dikarenakan pendapatan yang tidak tetap.

Seperti yang diungkapkan oleh Sudiarowaruwu (39 tahun, buruh bangunan):

"...Pendapatan indak manantu do, yo wak tukang nyo kadang lai karajo bilo lai ado proyek kadang indak se do. Ko alah duo minggu indak karajo. Kalau lai karajo biasonyo lai bagaji Rp.80.000-, sahari..."

(...Pendapatan tidak menentu, ya saya hanya buruh terkadang kerja kalau ada proyek kadang tidak sama sekali. Ini sudah dua minggu tidak kerja, kalau kerja biasanya ada dapat gaji Rp.80.000-, sehari...)(wawancara 7 Desember 2011)

Begitupun yang di ungkapkan oleh Masconglase (35 tahun) yang bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan:

"...Yo ba'a lai, karajo sakali saminggu dapek pitih kini ditahan-tahankan se lah sampai saminggu ka datang. Kalau pendapatan perbulan cubo se ituang Rp.300.000-, saminggu dikali ampek Rp.1.200.000-, nyo..."

("...ya gimana lagi, kerja sekali seminggu dapat uang hari ini dihemat-hematlah sampai seminggu yang akan datang. Kalau pendapatan perbulan coba saja hitung Rp.300.000-, seminggu dikali empat minggu hanya Rp.1.200.000-, (wawancara 11 Desember 2011)

Informan Syamsuri yang bekerja sebagai nelayan juga mengatakan bahwa pendapatan yang tidak tetap dikarenakan pekerjaan sebagai nelayan:

"...manjadi nelayan ko samo jo rasaki harimau, kadang lai dapek ikan kadang indak. Kadang lai sampai Rp.50.000-, sahari kadang tangan ampo ajo nan babaok pulang kalau lah buruak lauik..."

(...manjadi nelayan ini sama halnya rezki harimau. Terkadang ada dapat ikan kadang tidak. Terkadang sampai Rp.50.000-,per hari terkadang hanya tangan hampa yang dibawa pulang...) (wawancara 11 Desember 2011)

Dilihat dari tingkat pendidikan informan yang rendah ditambah pekerjaan yang ditekuni juga rendah dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu maka

kehidupan ekonomi informan juga rendah. Artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan informan yang rendah dengan tingkat ekonomi yang juga rendah. Pada banyak kasus kemiskinan, terjadi kait mengait (hubungan) antara pendidikan dengan ekonomi. Kemiskinan menyebabkan orang tak bisa melanjutkan sekolah, oleh karenanya tak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan hanya menekuni pekerjaan rendah dengan pendapatan kecil, karena pendapatan kecil, maka ia menjadi miskin.

3.1.3 Kondisi Tempat Tinggal dan Fasilitas Yang Dimiliki

Kondisi tempat tinggal informan dan fasilitas beserta peralatan yang dimiliki dalam rumah dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.4 Kondisi Tempat Tinggal dan Fasilitas Yang Dimiliki

No.	Informan	Kondisi Rumah				Kepemilikan Rumah							
		Luas (m)	Non Permanen	Semi Permanen	Permanen	Pribadi	Sewa	Asal Listrik	Sumber Air	MCK	Lahan Pertanian	Peralatan Rumah	
1.	Yohancs	3x4	√	-	-	√	-	-	Gunung	-	-	Kebun kelapa (30 batang)	-
2.	Martalinus	7x7	-	-	√	√	-	PLN	Gunung	√	-	Pisang 1/3hektar	Tv 21', kulkas, alat dapur
3.	Sudiaro	6x8	-	√	-	√	-	Rumah tetangga	Gunung	-	-	-	Tv 14', kipas angin
4.	Mascong	4x4	-	√	-	-	-	Rumah tetangga	Gunung	-	-	-	kipas angin, tv 14'
5.	Syamsuri	7x10	-	-	√	√	-	PLN	Sumur bor	√	-	-	Tv 21',kipas, kulkas, alat dapur
6.	Slamét	4x5	-	√	-	-	√	Rumah tetangga	Gunung	-	-	-	TV21'
7.	Sumitro	6x7	-	√	-	√	-	PLN	Sumur bor	√	-	-	Tv21', tape, kulkas, alat dapur
8.	Pangosara	4x6	-	√	-	√	-	-	Gunung	-	-	-	TV14'
9.	Syahbudin	6x10	-	-	√	√	-	PLN	Sumur bor	√	-	Kelapa, salak, cengkeh	Tv21', tape, kulkas, alat dapur
10.	Ujang	6x8	-	√	-	√	-	PLN	Gunung	√	-	-	Tv21', kipas angin, alat dapur
11.	Zulnedi	5x5	-	√	-	√	-	PLN	Gunung	√	-	Cengkeh, kelapa	Tv21', kipas angin, alat dapur

Sumber : Analisis Data 2011

Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa diantara 12 informan 1 informan tinggal di rumah non permanen yang hanya berukuran 4x4 m², 3 orang tinggal di atas rumah permanen dengan ukuran 10 meter panjang dan 7 meter lebar.

Sedangkan 8 informan lagi dapat dikatakan mempunyai rumah semi permanen dikarenakan luas, fasilitas air, listrik dan MCK yang tidak ada di dalam rumah. Serta dari 12 informan tersebut 2 informan menyewa (kontrak) sedangkan 10 informan sudah memiliki rumah pribadi (milik sendiri). Dilihat dari kepemilikan harta benda, informan mempunyai alat elektronik seperti televisi, kulkas, sepeda motor tipe bebek sedangkan bagi informan nelayan ada yang punya kapal milik sendiri dengan tipe sampan kecil dan ada juga yang menyewa dengan orang lain atau bekerja dengan nelayan lain.

Dalam analisis ini terdapat suatu keganjilan pada tiga informan yaitu Bapak Syahbuddin, Syamsuri dan Martalinus dimana tingkat pendidikan ketiga informan yang rendah, ditambah dengan pendapatan dan jenis pekerjaan juga rendah semestinya berkaitan dengan kepemilikan rumah juga tidak lengkap. Tetapi kenyataannya, dari data di atas hal itu tidaklah terbukti. Kenapa tidak terbukti? Karena diketahui bahwa ketiga informan tersebut memiliki rumah dengan kondisi permanen yang cukup besar dan luas ditambah lagi informan Syahbudin memiliki lahan pertanian yang luas terlihat dari berbagai jenis pertaniannya, selain itu ketiga informan tersebut juga pernah mengalami pengusuran dari pemerintah dengan ganti rugi yang cukup besar.

3.1.4 Awal Kedatangan ke Gunung Padang

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan dan peningkatan aktivitas kota serta tingginya urbanisasi mengakibatkan kebutuhan akan perumahan dan prasarana kota semakin meningkat pula. Hal ini menimbulkan masalah perumahan yang rumit terutama pengadaan perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) cenderung menempati hunian seadanya, tanpa memikirkan beberapa aspek seperti lokasi bangunan, legalitas tanah dan bangunan, ataupun tanpa memikirkan bahaya yang mengancam keberadaan mereka.

Keberadaan permukiman penduduk di Gunung Padang telah banyak menimbulkan permasalahan seperti tidak adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), rawan longsor dan mengancam keselamatan jiwa, bergantinya lahan hijau menjadi lahan terbangun dan selain itu daerah ini berada pada kawasan hutan lindung. Tetapi walaupun demikian semakin hari kawasan ini semakin dipadati oleh bangunan baru dikarenakan kawasan ini juga merupakan kawasan objek wisata taman Siti Nurbaya. Di kawasan ini dihuni oleh berbagai etnis, mulai dari pendatang seperti Jawa dan Nias maupun penduduk asli Gunung Padang. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Slamet (45 tahun, Nelayan)

“...Awak datang kasiko pado tahun 1978, Amak jo abak keturunan Jawa tapi awak lah maraso tanah iko ko tanah tumpah darah wak...”

“(“...Saya datang kesini pada tahun 1978, Ayah dan ibu keturunan Jawa tapi saya sudah merasa tanah ini tanah tumpah darahku....” (wawancara 7 Desember 2011).

Selanjutnya ibu Yurlina (Butet) 26 tahun, ibu rumah tangga:

“...Saya dan suami berasal dari Gunung Sitoli Nias, datang ke Padang tahun 2007 tetapi baru tinggal di Gunung Padang sekitar tiga tahun lalu. Sebelumnya tinggal di sungai Sapik Palinggam...” (wawancara 7 Desember 2011)

Informan selanjutnya Fitriani (29 tahun) dan Yoanes, (34 tahun, petani tuak):

“...Nenek moyang kami yang sabana-bana nenek moyang asli Nias, tapi kami alun pernah pulang ka kampung halaman alah salamo tujuh keturunan. Jadi kalo lahia awak lahia di Palinggam, tapi baru pindah kamari sajak tahun 1999 pas manikah dan tanah samo kabun tuak ko warisan dari almarhum ayah uda....”

“...Nenek moyang kami yang sebenar-benarnya nenek moyang asli Nias, tetapi kami belum pernah pulang ke kampung halaman sudah selama tujuh keturunan. Jadi kalau lahir, saya lahir di Palinggam, tetapi baru pindah kesini sejak tahun 1999 pas menikah dan tanah sama kebun tuak ini warisan dari almarhum ayah uda (suami)....” (wawancara, 1 Desember 2011).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang merupakan warga Gunung Padang dapat disimpulkan bahwa didaerah ini terdapat warga asli maupun warga pendatang. Hal ini juga dikuatkan oleh penuturan pak Zulnedi (48 tahun, selaku ketua RT):

“...warga ambo kebanyakan warga asli dan pendatang, perimbangannya kira-kira ampek puluah persen pribumi yang artinya lah mahuni daerah iko sajak nenek moyangnyo lah disiko juo dan lahia di siko pulo. Anam puluah persen lai warga pendatang nan artinya alun bara tahun datang kasiko atau asa nenek moyangnyo ndak disiko, tapi warga siko ko banyak urang Niah ado juo asli Jawa dan daerah lua kota Padang....”

“...warga saya kebanyakan warga asli dan pendatang, perimbangannya kira-kira 40% pribumi yang artinya sudah menghuni daerah ini sejak nenek moyangnya sudah disini dan lahir disini. 60% lagi warga pendatang yang artinya belum berapa tahun datang kesini, tetapi warga disini banyak orang Nias, tetapi ada juga yang asli Jawa, Aceh dan daerah luar kota Padang...” (wawancara 25 Mei 2011)

Dari hasil wawancara dapat diinterpretasikan bahwa awal kedatangan informan disebabkan oleh:

1. Merantau bagi informan pendatang dengan pola dimulai dari keberangkatan dari kampung halaman membawa anak dan istri dan menetap diberbagai tempat dulu baru tinggal di Gunung Padang.
2. Ikut orang tua seperti informan Syamsuri dan Slamet pada tahun 1978 datang ke Padang, menetap di jalan Arau, barulah 4 tahun setelah itu mereka pindah ke Gunung Padang.
3. Sedangkan informan Rini dan Fitri pindah ke Gunung Padang karena ikut suami yang berketurunan Nias setelah menikah.
4. Karena tertarik atas perubahan atas nasib seorang teman yang sudah pernah mencoba merantau sebelumnya.
5. Bagi informan asli mereka telah sejak lahir menetap di Gunung Padang.

Pola di atas merupakan suatu pola merantau (migrasi) bagi informan pendatang dan pola bertahan bagi informan asli. Merantau sering bertujuan untuk mencari perubahan nasib ke arah yang lebih baik di tempat lain dengan meninggalkan segala hal yang berhubungan dengan kampung halaman. Karena tidak sanggup dengan kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja di desa, dan pada saat yang sama tertarik oleh harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan lebih tinggi menyebabkan migrasi dari desa ke kota. proses tersebut merupakan proses urbanisasi karena adanya berbagai dorongan

dari kampung halaman dan juga karena adanya banyak hal yang menarik di kota Padang membuat mereka bertekad untuk pindah dari kampung dengan membawa anak istri.

3.1.5 Hak Pakai Atas Tanah

Selama penelitian ada hal baru yang peneliti ketahui, masyarakat yang bermukim disini tidak memiliki legalitas dan bukti kepemilikan tanah. Mereka hanya meminta izin kepada RT dan kepada seorang wanita yang diyakini keturunan Raja yang biasa mereka panggil dengan ibu I. Masyarakat hanya perlu meminta izin kepada ibu ini untuk bisa bermukim di daerah ini. Dan biasanya mereka langsung bisa membangun maupun bercocok tanam di kawasan ini tanpa banyak persyaratan ataupun harus membeli tanah, karena ibu I ini tidak menjual tanahnya karena tanah di Gunung Padang ini merupakan tanah kaumnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Rini (29 tahun, ibu rumah tangga)

“...kasado tanah yang awak pakai ko ndak punyo awak do, awak hanyo punyo hak pakai sajo hak pakai untuk tinggal disiko, mambuek rumah samo hak bakabun. Asa tahu se, kasado rumah nan ado di Pabayan ko ndak ado nan punyo kami, cuma kami ado dapek hak pakai dari ibu I. Uni indak lo tau bana do statusnyo ibu I disiko tapi nan pasti nyo punyo kuaso disiko dan masyarakat sagan samo nyo. Kalau ado urang baru datang dan mambangun disiko tanpa saijin inyo pasti nyo berang...”

“...Semua tanah yang saya pakai ini tidak punya saya, saya hanya punya hak pakai saja, hak pakai untuk tinggal disini, membuat rumah sama hak berkebun. Asal tahu saja, semua rumah yang ada di Pabayan ini tidak ada yang punya kami, cuma kami ada dapat hak pakai dari ibu I. Uni tidak tahu pasti status ibu i disini tetapi yang pasti dia punya kuasa disini dan masyarakatpun segan kepadanya. Kalau ada orang baru yang datang dan membangun disini tanpa seizin dia pasti dia marah...” (wawancara, 1 Desember 2011)

Setelah dilakukan wawancara mendalam dengan ketua RT maka didapatkan informasi keberadaan ibu I dan status kekuasaannya di Gunung Padang:

"...iyo, yang punyo tanah disiko ibu I nyo keturunan puti atau keturunan rajo. Nyo batampek tinggal di Cendana. Nan ka manggantian kekuasaannyo bisuak tu namonyo ibu An guru di SMA I anaknyo camat di Lubuak Kilangan. Yolah minta ijin ka inyo lay kalau bangun ka mambangun kan tanah ko tanah kaum nyo mah. Kalau masalah seo atau bayia ka mambayia itu tagantuang pajakan awak samo inyo..."

("...iya, yang punya tanah disini ibu I, dia keturunan putri atau keturunan raja. Dia bertempat tinggal di Cendana Yang akan menggantikan kekuasaannya nantinya namanya ibu An guru SMA 1 anaknya camat di Lubuk Kilangan. Ya iya lah minta izin ke dia kalau mau bangun membangun, kan tanah kaumnya. Kalau masalah sewa atau pembayaran itu tergantung perjanjian kita sama dia..." (wawancara 11 Desember 2011).

Dari penuturan awal kedua informan di atas, terdapat suatu fenomena baru bahwasanya ada kekuasaan dan wewenang yang mempengaruhi masyarakat. Dalam hal ini tuan tanah berperan sebagai orang yang berkuasa atas tanah dan juga mempunyai wewenang tersendiri atas tanah dan masyarakat. Sehingga jika membangun rumah di Gunung Padang harus dengan seizinnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat diinterpretasikan bahwa di dalam adat Minangkabau ada harta pusaka tinggi yaitu tanah yang dimiliki oleh suatu kaum. Harta tersebut bisa berasal dari seorang lelaki yang diwariskan menurut garis keturunan ibu. Tanah tersebut diwariskan dari leluhur dan dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang dengan adanya kaum ibu yang berhak atas guna tanah dan juga menjaga harta pusaka tersebut.

Agar bisa bermukim di Gunung Padang warga pendatang hanya perlu mendapat izin hak pakai dari ibu I sebagai orang yang mewarisi harta pusaka kaumnya, sementara di pusat kota para pendatang tersebut harus membeli tanah. Di pusat kota harga normal tanah per meter persegi dapat mencapai Rp.1.000.000,-/m², yang dibutuhkan paling tidak 42 m² = Rp.42.000.000,-, itu baru membeli tanah belum termasuk harga rumah. Dengan mahalnya biaya perumahan di pusat kota membuat penduduk memilih tinggal di Gunung Padang karena hanya dengan izin pakai mereka sudah bisa membangun permukiman. Fenomena inilah yang menciptakan permukiman liar baru di perkotaan karena seorang permukiman cenderung merupakan para pendatang yang tidak memiliki tempat lain untuk bertahan hidup.

3.1.6 Bukti Kepemilikan Tanah dan Rumitnya Pengurusan IMB

Permukiman penduduk di Seberang Pabayan bisa dikatakan ilegal karena umumnya mereka tidak memiliki sertifikasi dan legalitas tanah maupun rumah. Hal ini disebabkan karena tanah yang mereka tempati hanya memiliki hak pakai dari orang yang punya kekuasaan atas tanah kaumnya. Jikapun mereka menyanggupi untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pasti akan terbentur pada bukti kepemilikan tanah sebagai salah satu syarat permohonan IMB yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DTRTB) Kota Padang. Selain itu rumitnya pengurusan IMB dan besarnya biaya yang dikeluarkan membuat warga tidak mampu secara ekonomi dan status tanah untuk

mengurus karena takut permohonan mereka tidak dikabulkan. Seperti yang diungkapkan oleh dua informan di bawah ini:

"...barapo pulo tu pitih untuak ma urus IMB tu? Maha pulo pastinyo tu..."

(...berapa pula uang untuk mengurus IMB itu? Pasti mahal ya...")
(Masconglahe 35 tahun, wawancara 11 Desember 2011)

Begitupun seperti yang diungkapkan oleh Pak Syahbudin(68 tahun):

"....Ba'a ka maurus IMB atau legalitas nan lain sadangkan awak tingga di ladang urang. Alun ka maurus lay awak lah kanai karano ndak punyo surek tanah..."

("....Bagaimana mau mengurus IMB atau legalitas yang lain, sedangkan kita tinggal di ladang orang. Belum di urus kita sudah kena karena tidak punya surat tanah....")(wawancara 11 Desember 2011).

Sebagai warga pendatang yang tidak memiliki tanah dan hanya tinggal (menumpang) di atas tanah suatu kaum yang memiliki hukum dan ketentuan berdasarkan adat Minangkabau membuat kepemilikan tanah juga rumit. Dalam peraturannya tentang tanah ulayat, kaum tidak boleh menjual tanah tersebut kepada pihak lain karena tanah itu merupakan milik kaum (suku). Seperti contohnya suku Chaniago membuka ladang pertama di Gunung Padang maka tanah tersebut merupakan tanah milik bersama suku Chaniago sampai kapanpun. Sedangkan suku-suku lain hanyalah tamu atau menumpang tinggal disana yang tidak memiliki hak milik seperti suku chaniago. Jadi dengan ketiadaan legalitas kepemilikan tanah membuat penduduk terpaksa menerima bahwa permukiman mereka merupakan permukiman ilegal.

3.2 Pola Permukiman Penduduk di Lereng Gunung Padang

Pola permukiman penduduk adalah bentuk umum sebuah permukiman penduduk dan terlihat mengikuti pola tertentu. Pola permukiman penduduk berbeda-beda disetiap daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pola permukiman penduduk diantaranya yaitu:

- **Bentuk Permukaan Bumi**

Bentuk permukaan bumi berbeda-beda, ada gunung, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Kondisi yang berbeda secara otomatis akan membuat pola kehidupan yang berbeda, misal penduduk pantai bekerja sebagai petani. Pola kehidupan yang berbeda akan menyebabkan penduduk membuat permukiman yang sesuai dengan lingkungan tempat penduduk itu berada

- **Keadaan Tanah**

Keadaan tanah menyangkut kesuburan/kelayakan tanah ditanami. Seperti kita ketahui, lahan yang subur tentu menjadi sumber penghidupan penduduk. Lahan tersebut bisa dijadikan lahan pertanian atau semacamnya. Karena itu, penduduk biasanya hidup mengelompok didekat sumber penghidupan tersebut.

- **Keadaan Iklim**

Iklim memiliki unsur-unsur diantaranya curah hujan, intensitas cahaya matahari, suhu udara, dan sebagainya yang berbeda-beda disetiap daerah. Perbedaan iklim ini akan membuat kesuburan tanah dan keadaan alam disetiap

daerah berbeda-beda yang tentu membuat pola permukiman penduduk berbeda pula. Sebagai contoh penduduk di pegunungan cenderung bertempat tinggal berdekatan, sementara penduduk di daerah panas memiliki permukiman yang lebih terbuka (agak terpencar).

- **Keadaan Ekonomi**

Kita tentu ingin beraktivitas sehemat-hematnya (meski itu soal waktu). Kita tidak ingin tinggal jauh dari pusat perkantoran, sekolah, dan pasar. Jika kita memilih rumah, tentu kita akan memilih tempat yang tepat sebagai salah satu faktor utama. Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap pola permukiman penduduk (ini jelas terlihat di kota)

- **Kultur Penduduk**

Pola permukiman penduduk sangat bergantung pada kemajuan dan kebutuhan penduduk itu sendiri. Jika penduduk itu masih tradisional, pola permukimannya akan cenderung terisolir dari permukiman lain. Permukiman di daerah tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang masih anggota suku atau yang masih berhubungan darah.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, kawasan Gunung Padang merupakan kawasan perbukitan dengan kondisi tanah yang subur untuk ditanami. Bentuk permukiman penduduk cenderung berpola terpusat. Pola pemukiman ini mengelompok membentuk unit-unit yang kecil dan menyebar, umumnya terdapat di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi yang berelief kasar, dan

terkadang daerahnya terisolir. <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2241348-pengertian-pola-pemukimanpenduduk/#ixzz115rb8ytr>. (Diakses 27 Januari 2012)



Sumber: Internet

Gambar 3.1 Kondisi Permukiman Kawasan Gunung Padang

Dengan demikian maka berdasarkan pengertian di atas dapat diklarifikasikan bahwa pola permukiman penduduk di Gunung Padang yaitu:

1. Mengelompok berdasarkan persamaan latarbelakang, nasib dan mata pencaharian. Seperti yang terlihat pada gambar



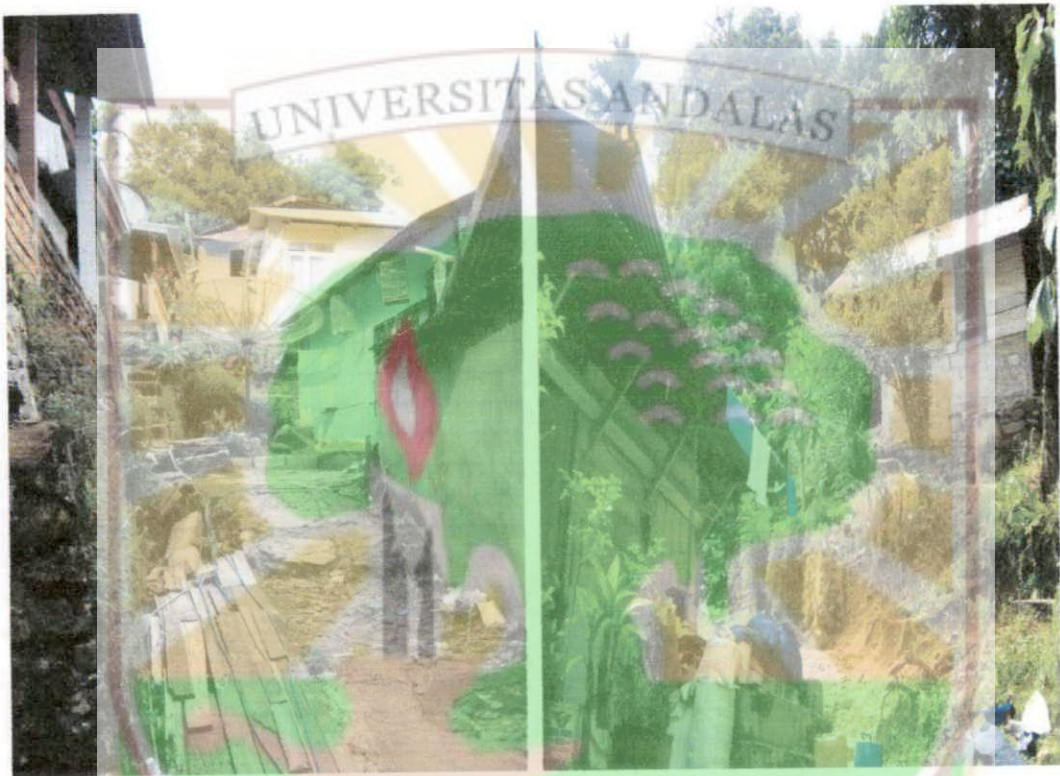
Gambar 3.2 Mengelompok

2. Terpusat membentuk setengah lingkaran mengikuti bentuk dan garis jalan yang berada di dalam permukiman penduduk karena di kawasan ini terdapat lapangan sepakbola yang berbentuk lingkaran.



Gambar 3.3 Terpusat Mengikuti Bentuk Jalan

3. Terpusat mengikuti tingkat kemiringan dikarenakan umumnya rumah-rumah dibangun di lereng bukit. Sebagian ada yang sudah di semen beton dan sebagian masih dengan kondisi tanah yang subur.



Gambar 3.4 Mengikuti Tingkat Kemiringan Tanah



4. Dekat dengan muara dan laut yang merupakan sumber mata pencaharian penduduk umumnya.



Gambar 3.5 Dekat Sumber Mata Pencaharian

Dari hasil penelitian maka dapat diinterpretasikan bahwa pola permukiman di Gunung Padang terpusat yang artinya Permukiman penduduk memusat mendekati sumber-sumber kehidupan seperti mengitari atau mendekati sumber mata pencaharian, seperti laut, lahan pertanian, tempat pekerjaan maupun dekat dengan sanak saudara. Karena penduduk yang tinggal di permukiman yang terpusat biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan pekerjaan, sehingga pola ini akan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan mudah. <http://arisudev.wordpress.com/2010/12/01/pola-permukiman-penduduk/> (Diakses 27 Januari 2012)

3.3 Alasan-Alasan Bertahannya Keluarga Yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana Lereng Gunung Padang Dari Beberapa Aspek

Masyarakat di Gunung Padang menyadari sepenuhnya keberadaan mereka di kawasan hutan lindung yang merupakan daerah rawan bencana. Tetapi karena adanya beberapa alasan maka mereka berani mengambil resiko tersebut yang dapat membahayakan harta, jiwa dan keluarga. Alasan-alasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek sebagai berikut:

3.3.1 Ekonomi

Baik di kota maupun di desa alasan pertama ini merupakan masalah klasik yang menjerat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berusaha mempertahankan keberadaannya di tengah susahny kehidupan di perkotaan. Modal yang terbatas, kurangnya pengetahuan dan sumber mata pencaharian sebagai nelayan yang mengharuskan mereka dekat dengan laut sehingga membuat mereka bertahan tinggal disini. Dalam menganalisis aspek ekonomi ini bisa dijabarkan dalam penjelasan berikut:

1. Kurangnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

· Susahnya mencari lapangan pekerjaan yang memadai serta minimnya akses telah berdampak pada kondisi ekonomi. Ilmu sebagai tolok ukur kualitas pengetahuan seseorang sangat berpengaruh dalam bersaing di dunia kerja. Keterbatasan ilmu dan pengalaman membuat mereka tidak mampu bersaing dengan pencari kerja lain sehingga mau tidak mau mereka hanya mampu bekerja

sebagai buruh, nelayan, serabutan, dan kerja apa saja yang tidak mengandalkan keterampilan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara berikut ini:

"...awak karajo di palabuhan manjadi buruh angkuik barang kapal, karajo sakali saminggu dapek gaji tigo ratuuh ribu. Padiah diak, pitih tigo ratuuh ribu tu awak samo anak jo ibuk iduik untuk saminggu bisuaknyo. Kalau karajo nan lain skil ndak ado do..."

("...saya kerja di pelabuhan menjadi buruh angkut barang kapal. Kerja sekali seminggu dapat gaji tiga ratus ribu. Pedih dek, uang tiga ratus ribu itu saya sama anak dan ibu hidup untuk seminggu kedepannya. Kalau kerja yang lain skil saya tidak ada...." (Masconglase 35 tahun, wawancara 11 Desember 2011)

Lokasi permukiman yang terletak di pinggiran kota Padang dengan dikelilingi oleh hutan lindung yang luas beserta dibatasi oleh Batang Arau atau Muara Padang membuat akses masyarakat untuk bekerja di pusat kota tidak diperlukan lagi. Ditambah lagi dengan angkutan umum yang jarang sampai ke Seberang Pabayan. Masyarakat disini hampir sepenuhnya menggantungkan hidup sebagai nelayan dan buruh angkut dikarenakan dekat dengan permukiman dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Mereka biasa melaut mulai saat subuh sampai siang, sehingga tidak terpikirkan lagi untuk mencari pekerjaan lain. Karena mereka dapat memasarkan hasil yang didapat dipelelangan ikan di tepi muara dekat dengan permukiman.

Seperti ketika observasi peneliti melihat langsung ramainya masyarakat yang datang ke pelelangan ikan tersebut. Tidak hanya masyarakat disana tetapi juga masyarakat yang sengaja datang kesana maupun pengunjung yang sedang

berwisata ke Taman Siti Nurbaya dikarenakan harga ikan yang cukup murah.

Seperti yang diungkapkan oleh pak Syamsuri (47 tahun, nelayan)

"...Ba'a ka pindah ka Bunguih atau daerah yang ado pantai nan lain sadangkan nelayan Bunguih se kamari dibaoknyo ikan, nelayan puruih pun mode itu lo kasiko nyo mambaok ikan nyo. Apo sabab muara nan paliang rancak satu-satunyo muara disiko, karano kalau misal hari badai bisa balinduang disiko. Kalau manjua ikan disiko rami nan ka mambali..."

("...Bagaimana mau pindah ke Bungus atau daerah lain yang ada pantainya sedangkan nelayan bungus saja kesini mereka bawa ikannya, nelayan purus pun juga seperti itu kesini mereka menjual ikannya. Apa sebab, muara yang paling bagus satu-satunya disini, karena kalau misalnya badai bisa berlindung disini. Kalau menjual ikan disini banyak yang akan membeli..." (wawancara 11 Desember 2011)

Berdasarkan wawancara di atas interpretasi jarak tempuh dapat dianalisis dengan asumsi bahwa perjalanan membutuhkan biaya. Semakin jauh perjalanan semakin tinggi biaya. Sementara biaya adalah uang, uang berasal dari pendapatan dan pendapatan berasal dari pekerjaan. Artinya pengeluaran yang relatif besar membuat informan berpikir lagi untuk mencari pekerjaan disektor lain selain dikarenakan akses yang minim juga jarak tempuh memakan biaya dan waktu sehingga bekerja menjadi nelayan sudah cukup bagi mereka.

Di dalam proposisi deprivasi-kejemuhan Homans mendefinisikan dua konsep penting tentang biaya dan keuntungan yaitunya: "makin besar keuntungan yang diterima seseorang sebagai hasil tindakannya, makin besar kemungkinan ia melaksanakan tindakan itu" (Homans dalam Ritzer, 2004:365).

Karena itulah maka, golongan ekonomi lemah demi penghematan biaya transportasi mencari tempat tinggal mendekati pusat kota yang kebetulan juga merupakan zona perumahan yang sewanya murah. Dengan demikian, demi

murahnya hidup, mereka bertumpuk-tumpuk di kawasan yang berpenduduk padat sekali (Daldjoeni, 2003: 201).

Dengan hanya menggantungkan hidup dengan laut membuat penghasilan jadi tak menentu. Jika cuaca bagus hasil yang didapat juga bagus, tetapi kalau badai nelayan pun tidak pergi ke laut. Sehingga jika badai datang selama 1 minggu otomatis pendapatan tidak ada. Seperti yang diungkapkan oleh informan pak ujang (43 tahun, nelayan):

“...Pai ka lauik siap subuah lah pulang jam-jam tigo atau jam ampek kalau hari rancak, tapi kalau tiba-tiba badai di lauik bisa pulang pagi se lai. Kini sadang badai mah lah tigo hari ndak ado ka lauik...”

(“...Pergi ke laut selesai subuh pulang jam tiga-an atau jam empat-an kalau cuaca bagus. Tetapi kalau tiba-tiba badai di laut pagi sudah pulang saja lagi. Sekarang lagi badai sudah sejak tiga hari yang lalu tidak ada ke laut...”
(wawancara 1 Desember 2011)

Dari penuturan informan di atas pendapatan yang tidak jelas disebabkan oleh karena pengaruh cuaca yang tidak menentu membuat pendapatan juga tidak menentu. Nominalnya jika pendapatan rendah otomatis tetap harus memenuhi kebutuhan hidup, salah satu kebutuhan hidup tersebut adalah rumah.

2. Tuntutan Mata Pencarian

Dari semua informan yang peneliti dapatkan secara sengaja antara penduduk asli dan pendatang mayoritas mereka bekerja sebagai nelayan. Hanya satu dua orang yang bekerja di sektor lain seperti tukang borong bangunan, buruh kapal dan petani tuak. Umumnya mereka bertahan tinggal disini karena tuntutan mata pencarian sebagai nelayan. Faktor ini merupakan jawaban utama dari

informan yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Jika mereka disuruh pindah ke tempat lain mereka merasa mata pencahariannya akan mati. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Syamsuri (47 tahun, Nelayan):

“...alasanmyo kami bataan disiko karano tuntutan iduik. Kami ko nelayan kalau disuruh pindah ka tampek lain tu mati pencarian kami dibueknyo samo apo kami makan maidutkan anak bini...”

“...alasanmya kami bertahan disini karena tuntutan hidup. Kami ini hanya nelayan jika disuruh pindah ke tempat lain matilah mata pencaharian kami dibuatnya, sama apa kami makan menghidupi anak istri...”(wawancara 11 Desember 2011)

Gunung Padang merupakan perbukitan yang di kelilingi oleh Samudra Indonesia beserta beberapa pulau-pulau kecil sehingga sangat kaya dengan hasil lautnya. Adanya perbukitan Gunung Padang yang menjadi pelindung dari badai maupun muara yang teduh membuat masyarakat yang bekerja sebagai nelayan otomatis hanya memiliki pengasilan dari laut. Karena laut merupakan sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Letak yang strategis dengan muara yang bagus membuat nelayan-nelayan tersebut tidak mau pindah dengan alasan mata pencaharian mereka akan mati.

3. Murahny Sewa Tanah Atau Uang Pakai Tanah

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan didapat informasi bahwa harga sewa atau uang hak pakai yang diberikan kepada yang punya tanah tidak menentu dan cenderung dengan harga cuma-cuma. Ada yang mengatakan cuma dengan memberi uang Rp.50.000-, per tahun bahkan hanya dengan Rp.

30.000 per tahun atau tergantung perjanjian dengan yang punya tanah sudah bisa mendirikan bangunan. Hal itu juga penyebab tak terkontrolnya rumah-rumah penduduk di lereng bukit ini oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh informan Desriani (39 tahun ibu rumah tangga)

“...awak ndak punya tanah do, awak menyewa per tahun ka ibu I nan punyo tanah ko, tahun patang awak bari limo puluh ribu kalau ndak salah...”

“...saya tidak punya tanah, saya menyewa per tahun sama ibu i yang punya tanah ini. Tahun kemarin saya kasih Rp.50.000-, kalau tidak salah...”(wawancara 1 Desember 2011).



Gambar 3.6 Rumah Yang Cukup Besar di atas Tanah Hak Pakai

Sedemikian mudahnya mendapatkan hak pakai tanah membuat masyarakat leluasa mendirikan bangunan-bangunan baru. Fenomena ini juga diperkuat oleh informan kunci yang merupakan penduduk asli Seberang Pabayan bernama Nurmidah (67 tahun). Tetapi beliau mengungkapkan orang pertama kali dalam kaumnya membuka ladang di Gunung Padang adalah bapaknya yang bernama Sutan Gombok. Tetapi karena sistem kekerabatan di Minangkabau matrilineal dan

kebetulan bapaknya punya adik perempuan yang merupakan ibu dari ibunya ibu I makanya tanah itu turun ke ibu I. Beliau mengungkapkan bahwa:

"...dulunyo ndak mode itu do, kalau ado nan nio tingga di Gunung Padang sasuai perjanjian bara lamo nyo tingga disitu, ado bateh waktunyo. Kalau kini alah sumbarang urang se masuak disitu. Minta izin baitulah se ado nan cuma mambari limo puluh ribu satahun nan parahnyo ado nan cuma sapuluah ribu satahun, waktu minta izin keceknyo ka mambangun pondoknyo, e kironyo nyo bangun rumah gadang-gadang; rancak-rancak lo lai, misalnyo nyo ngecek hanyo ka mambangun 10 meter bisa jadi beko tu 20 meter malah ado nan langsung mambangun tanpa ado pitih sewa apo-apa. Lah payah ibu i tu mamintak tapi ba'a lah urang tu mambuek rumah di ateh bukit. Ma talok dek ibu tu awak lah gaek ndak talok mandaki ka ateh lay do..."

("...dulunya tidak seperti itu, kalau ada yang mau tinggal di Gunung Padang harus sesuai perjanjian berapa lama akan tinggal disana dan ada batas waktunya. Kalau sekarang terserah siapa saja masuk kesana. Minta izin dengan cuma-cuma ada yang hanya memberi lima puluh ribu setahun malah parahnya ada yang cuma sepuluh ribu setahun, waktu minta izin katanya mereka hanya membangun pondok tetapi ternyata mereka bangun rumah yang besar-besar, dan bagus-bagus. Misalnya mereka mengatakan mau bangun 10 meter bisa jadi 20 meter malah ada yang langsung membangun tanpa ada uang sewa apa-apa. Sudah susah ibu I meminta uang sewa tetapi gimana lagi mereka bangun rumah di atas bukit, mana kuat sama ibu I kami sudah tua-tua sudah tidak kuat lagi mendaki ke atas..." (wawancara 14 Desember 2011)

Panggilan masyarakat sebagai Tuan tanah atau yang berhak menguasai tanah kaum bernama asli Putri Darsenilam membenarkan hal itu:

"...payah mamintak ndak amuah urang-urang tu mambayia do. Hanyo ciek duo urang nan mamintak ijin nyo itupun nyo bari duo puluh limo ribu, tigo puluh ribu satahun tu mah. Nyo manangih-nangih mintak izin, awak dek ibo a nan di surek hak pakai tu janjinyo hanyo mambangun pondok-pondok nyo e kiro nyo alah ditagak an se rumah gadang-gadang. Pas ado rumah-rumah nan kanai bongka dek pemerintah ka patang tu ndak ado nan ma agiah ka ibu do, padahal tanah ibu nan di pakai. ndak lo dek ibu do tapi ibu bagi-bagi samo RT untuak bisa di sumbangkan ka kampuang tu, atau beko ibu barian ka musajik. Tapi ma baratuih juta dapek ganti rugi tigo ratuik ribu nyo bari ka ibu nyo itupun ibu nan mamintak..."

“..sudah susah meminta uang sewa tidak mau mereka membayar. Hanya satu dua orang yang meminta izin itupun mereka beri uang dua puluh lima atau tiga puluh ribu setahun. Mereka menangis-nangis minta izin, karena saya kasihan. Di surat hak pakai itu janjinya hanya membangun pemondokan (rumah-rumah kecil) ternyata sudah mereka bangun rumah yang besar. Ketika ada rumah yang terkena bongkar sama pemerintah kemarin tidak ada yang basa basi ke ibu, padahal tanah tanah ibu yang dipakai. Itu bukan untuk ibu tetapi akan ibu bagi sama RT untuk bisa disumbangkan untuk kampung atau untuk mesjid. Tapi mana? Beratus juta mereka dapat ganti rugi cuma tiga ratus ribu mereka memberi itupun ibu yang menagih...” (wawancara 20 Desember 2011).

Dari penuturan ke empat informan dua diantaranya adalah informan kunci dapat disimpulkan bahwa latar belakang kepemilikan tanah, penerus, dan adanya kekuasaan yang mendapat pengakuan dari masyarakat menjadikan seseorang mempunyai wewenang di Gunung Padang.

Dalam proposisi Pendorong (*The Stimulus Proposition*), Homans mengungkapkan bahwa :

“Bila dalam kejadian di masa lalu dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu, makin besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa (Homans dalam Ritzer, 2004:364).

Walaupun ibu I sebagai orang yang berkuasa atas tanah di Gunung Padang tetapi tidak menetapkan berapa harga sewa tanah, selain itu ia juga tidak mempunyai alat atau sanksi bagi pemilik rumah yang melanggar perjanjian, sehingga akhirnya permukiman penduduk di lereng Gunung Padang semakin tidak terkendali.

3.3.2 Hukum

1. Lemahnya Hukum

Pemerintah menetapkan berbagai peraturan tentang pembangunan. Jika melewati jalan Khatib Sulaiman Padang dapat dilihat disepanjang jalan, baliho atau poster yang bertuliskan beberapa peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwasanya “Dilarang! Memulai membangun sebelum IMB dikeluarkan”; bunyi selanjutnya “Pemko Padang akan membongkar bangunan yang tidak memiliki IMB”. Begitu gencar pemerintah kota Padang menyerukan berbagai peraturan tentang izin bangunan. Tetapi setelah melakukan observasi dan penelitian di lapangan, mayoritas rumah maupun bangunan di Seberang Pabayan tidak memiliki IMB maupun sertifikasi tanah walaupun mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Informasi yang didapat dari informan mengatakan mereka tidak tahu menahu tentang IMB dan tidak ada yang menyuruh mereka untuk mengurus, begitu juga oleh RT, RW maupun Lurah. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan salah satunya Pak Syamsuri (45 tahun, Nelayan):

“...Katiko digusur pemerintah indak pernah batanyo, lai ado IMB kapado nan punyo rumah, sabab barapo banyaknyo rumah nan ado disiko ndak ado nan punyo IMB do, emang IMB rancak tapi kami bayia PBB taruih, lagipulo pemerintah ndak ado manyuruah untuak maurus...”

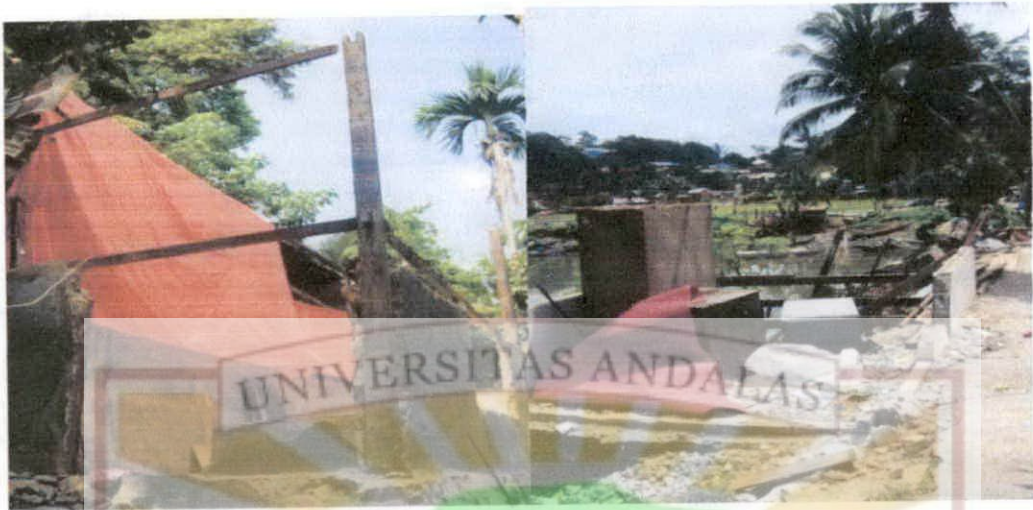
(“...Ketika digusur pemerintah tidak pernah bertanya apakah punya IMB kepada yang punya rumah, sebab berapa banyaknya rumah yang ada disini tidak ada yang punya IMB, memang IMB itu bagus tetapi Pajak Bumi dan Bangunan kita selalu bayar lagipula pemerintah tidak ada menyuruh untuk urus...” (wawancara 11 Desember 2011).

Hal senada juga dituturkan oleh ibu Butet (warga pendatang asli Gunung Sitoli, Nias)

“....Saya bayar PBB tetapi kalau IMB kami tidak tahu. Kalau ada RT menyuruh pasti kami urus....” (wawancara 07 Desember 2011)

Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 penanggulangan bencana Pasal 32 ayat 1 pemerintah menetapkan bahwa daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman. Artinya membangun di lokasi rawan bencana artinya ilegal. Begitupun menurut Undang-Undang RI No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman BAB I pasal 1 yang dimaksud dengan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar dari kawasan lindung. Sedangkan permukiman di lereng Gunung Padang merupakan kawasan rawan bencana yang diungkapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (BPBD) bahwa lokasi kejadian longsor terdapat di kawasan Gunung Padang, di Bukit Lantiak, Bukit Gado-Gado, Bukit Mata Air, dan Bukit Air Manis. Selain itu, longsor juga terjadi di Bukit Gaung, Lubuk Minturun, Sijinjaw Laut, Indarung, dan Bungus Teluk Kabung.

Walaupun dalam membangun disini merupakan perbuatan salah tetapi pemerintah memberi fasilitas listrik dan air. Sedangkan disisi lain sesuai dengan seruan baliho dan poster yang terdapat di jalan Khatib Sulaiman mengatakan bahwa “dilarang membangun dan akan dibongkar (digusur) bangunan yang tidak memiliki IMB”.



Gambar 3.7 Rumah-Rumah Yang Kena Bongkar

Masyarakat dilema antara peraturan pemerintah dan posisi mereka di Gunung Padang dikarenakan walaupun mereka mengurus IMB keberadaan mereka telah menyalahi aturan sebelumnya karena bermukim dilokasi rawan bencana dan hutan lindung yang artinya ilegal. Seperti yang dituturkan oleh anak pak Syahbudin (68 tahun):

"...ba'a ka maurus sagalo bantuak legalitas dan IMB sadangkan awak tinggal di kabun..."

("...bagaimana akan mengurus segala bentuk legalitas dan IMB sedangkan saya tinggal di kebun(lahan hijau)..."(wawancara 11 Desember 2011).

Di pusat kota IMB giat dilakukan oleh pemerintah kota, sementara di pinggiran kota tidak. Pemko tidak pernah menindak setiap bangunan baru, bahkan ketika warga yang terkena bongkar membangun lagi di tempat itu pemerintah diam saja. Padahal pemko sering bolak-balik kesana untuk memantau perkembangan pembangunan jalan ke taman Siti Nurbaya.

Homans dalam Proposisi Nilai mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini khusus berhubungan dengan ganjaran dan hukuman yang merupakan hasil tindakan. Apa yang diketengahkan oleh proposisi nilai adalah tingkat di mana orang menginginkan ganjaran yang diberikan oleh stimulus (Homans Poloma, 2007:63).

Dengan adanya masalah tanah ulayat dan hak pakai atas tanah dari pemangku kaum bagi warga pendatang membuat mereka merasa terlindungi dengan aturan dan hukum tradisional Minangkabau terkait permasalahan tanah ulayat ini. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota tumbuh subur di areal perbukitan Gunung Padang karena adanya hukum-hukum adat maupun resistensi (perlawanan) dari warga.

2. Kurangnya Perhatian Pemerintah

Kebijakan pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan khususnya yang berhubungan dengan pendirian bangunan seperti Perda No. 06 Tahun 1990, UU No. 28 Tahun 2002, serta Perda No. 01 Tahun 2005 telah berdampak terhadap permukiman tak terkecuali permukiman yang ada di Gunung Padang. Karena dari segi peraturan permukiman yang ada di sini umumnya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Setelah dilakukan wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, umumnya mereka menyadari keberadaan mereka yang tidak sesuai dengan rencana struktur tata ruang kota yang menjadikan kawasan Gunung

Padang sebagai kawasan objek wisata terpadu. Karena bisa saja sewaktu-waktu permukiman mereka di bongkar paksa oleh pemerintah, karena selain permukiman ilegal tanah yang dipakai juga hanya memiliki izin pakai. Seperti yang dituturkan oleh informan Slamet (45 Tahun, Nelayan)

“...kami lai sadar diri lo nyo kami nan ndak punyo tanah ko, sabagai warga negara nan baik, kami hanyo bisa manuruti...”

“...kami sadar diri dengan diri kami yang tidak punya tanah ini, sebagai warga negara yang baik kami hanya bisa menuruti kemauan pemerintah...” (wawancara 7 Desember 2011)

Begitupun yang diungkapkan oleh informan Sumitro (49 tahun, tukang pos):

“...yo awak sebagai masyarakat lemah ndak mampu malawan peraturan pemerintah tu do, awak iduik di ateh tanah pemerintah lo nyo. Yo mau tak mau wak manuruti asalkan ado dispensasi...”

“...sebagai masyarakat lemah tidak mampu melawan peraturan pemerintah itu, saya hidup di atas tanah pemerintah pula, mau tak mau saya menuruti asalkan ada dispensasi..” (wawancara 31 Desember 2011)

Dalam proposisi Restu-Agresi (*Approval-Agression*) Homans mengungkapkan bahwa:

“Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah, dia akan menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya” (Homans dalam Poloma, 2007:64-65).

Bilamana tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khusus ganjaran yang lebih besar dari yang dikirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka dia akan merasa senang, dia akan lebih

mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya. Dalam proposisi ini Homans berbicara tentang perilaku emosional manusia. Seseorang akan marah bilamana yang diharapkannya ternyata meleset. Homans menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga sosial itu benar-benar ada disebabkan oleh pertukaran sosial dan hal itu akan dianalisa dengan kelima proposisi diatas. Ganjaran-ganjaran itu dapat berwujud materi dan non materi (Homans dalam Poloma, 2007:64-65).

Dengan adanya penggusuran dan pembongkaran oleh pemerintah terkait terhambatnya pembangunan untuk kawasan wisata Taman Siti Nurbaya membuat masyarakat yang terkena gusur marah dan tidak menerima perlakuan tersebut. Masyarakat dengan berbagai alasan mengutarakan hak dan ketidaksenangannya terhadap pemerintah yang membongkar tempat tinggal mereka. Pemerintah yang telah berjanji tidak akan menyusahkan masyarakat hanya bisa memberi ganti rugi walaupun tanah yang dipakai bukanlah tanah mereka. Menyadari akan hal itu warga yang hanya memakai tanah dan mendapat ganti rugi merasa puas karena tindakan mereka memberi keuntungan yang berlipat ganda. Sehingga warga tersebut kembali membangun permukiman baru tidak jauh dari lokasi yang tergusur. Begitupun yang dilakukan oleh tuan tanah yang memberikan hak pakai kepada warga yang menetap disana. Ibu I sebagai orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang hanya bisa pasrah untuk menolong kaum miskin tanpa membutuhkan ganjaran materi.

3. Ketidak Pedulian Pemerintah

Ada sebetulnya kekecewaan dari masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah yang tidak peduli dengan nasib keluarga yang bermukim di Gunung Padang sehingga berdampak terhadap permukiman penduduk khususnya yang terkena gusur. Mereka mengatakan setiap kali penggusuran selalu tidak ada proses sosialisasi maupun pemahaman terlebih dulu kepada masyarakat. Seperti kekecewaan yang diungkapkan oleh informan Syahbudin (68 tahun):

“...itu salahnyo pemerintah tu, datang-datang langsung se main bongka. Nyo bari perintah ka pamong nan pamong tu jaweknyo pas kami malawan (kami hanyo menjalankan perintah atasan nyo pak), ndak egois pemerintah namonyo tu?...”

“(...itulah salahnya pemerintah, datang-datang langsung main bongkar. Dia beri perintah ke Pamong, pamong itu jawabnya pas kami melawan (kami hanya menjalankan perintah atasan), tidakkah egois pemerintah namanya?...”) (wawancara 11 Desember 2011)

Kekecewaan selanjutnya juga diungkapkan oleh ketua RT pak Zulnedi (48 tahun):

“...Waktu ado penggusuran kapatang tu awak takajuik juo karano masyarakat indak tau samo rencana tu do, eh tiba-tiba datang se pamong kamari maukua-ukua jalan lah nyo tandai se kalamak ati, tu berang masyarakat lai...)

“(...waktu penggusuran kemarin, saya juga terkejut karena masyarakat tidak tahu sama rencana penggusuran itu, tiba-tiba pamong datang kesini mangukur-ukur jalan lalu ditandai seenak hati (rumah-rumah), ya marahlah masyarakat...”) (wawancara 11 Desember 2011).

Kekecewaan terhadap pemerintah memancing perlawanan dari penduduk yang menjadi korban atas berbagai kebijakan. Ketiadaan informasi dan sosialisasi

berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah seperti yang diungkapkan oleh informan Slamet (45 tahun, nelayan)

"...cuma nan kami sasali dari pemerintah, apo nan diucapkan pemerintah indak samo. Dalam rapek patamo keceknyo kalau alah sabulan siap ganti rugi baru kami pindah tapi nyatonyo hanyo tigo ari nyo. Kecek pemerintah pulo waktu itu indak ka manyusahkan kami doh tapi malah mambunuah kalau mode iko mah..."

("...kami sadar diri dengan keberadaan kami yang tidak punya tanah, tetapi sebagai warga negara yang baik kami hanya bisa menuruti tetapi yang kami sesali dari pemerintah adalah apa yang diucapkan pemerintah tidak sama. Dalam rapat pertama katanya setelah satu bulan setelah ganti rugi baru kami pindah tetapi pada kenyataannya hanya tiga hari setelah terima uang. Katanya lagi pemerintah tidak akan menyusahkan masyarakat tetapi malah membunuh...") (wawancara 7 Desember 2011)

Walaupun masyarakat yang terkena gusur menerima ganti rugi mereka mengaku kecewa atas berbagai alasan seperti sikap pemerintah yang semena-mena dan tidak memikirkan nasib mereka setelah digusur. Karena penggusuran tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah masyarakat menerima ganti rugi yang membuat masyarakat tersebut tidak siap akan penggusuran itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum menemukan hunian baru, belum mengemas barang maupun harta benda serta belum adanya kerelaan menghadapi kenyataan rumah yang telah berpuluh-puluh tahun mereka tempati harus diruntuhkan. Sehingga hal ini memancing emosi dari penduduk yang terkena korban penggusuran untuk mengadakan perlawanan (resistensi) kepada pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Scott dalam Alisjahbana (2005:90) bahwa rakyat melakukan resistensi karena posisinya terpinggirkan dan mereka melawan terhadap dominasi yang menekan mereka.

4. Ketiadaan Alternatif

Sebagai masyarakat pendatang yang hanya menghuni di atas tanah kaum penguasa, masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak memberi alternatif yang lebih baik untuk masyarakat terkait bentroknnya keberadaan permukiman dengan peraturan pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Sudiarowaruwu (39 Tahun, buruh bangunan)

"...kami bukannya manolak untuak digusur, hanyo sajo kalau di agiah kepeng nyo tunggu pulo kami ko kehabisan kepeng tu dulu baru digusur. Andaknyo pemerintah lah mambari tampek lain untuak kami. Soalnya ba'a, kalau pemerintah agiah kepeng sapuluah juta dima kami bisa mandapek an rumah saharago itu? Kalaupun dapek rumah kontrakan ba'a makan kami?...."

("...kita bukannya menolak untuk digusur, hanya saja kalau diberi uang pemerintah menunggu kami kehabisan uang dulu baru digusur. mestinya pemerintah sudah memberi tempat atau rumah lain untuk kami tempati. Soalnya, kalau pemerintah beri uang sepuluh juta dimana kami bisa membeli rumah dengan harga sehitu? Kalaupun dapat rumah kontrakan bagaimana makan kami?...") (wawancara 7 Desember 2011)

Bagi sebagian keluarga yang lebih memikirkan dampak yang terjadi dimasa yang akan datang penggantian rugi bukanlah suatu jalan yang lebih baik. Mereka beranggapan bahwa ganti rugi hanya bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk beberapa waktu sedangkan setelah ganti rugi tersebut habis mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Alternatif lain yang dimaksud seperti tanah atau hunian yang benar-benar dikhususkan oleh pemerintah untuk mereka yang tidak mampu untuk membeli tanah di daerah lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Siahaan (1996:33) yang berpendapat bahwa kaum miskin mengadakan resistensi bukan karena keinginan untuk membuat kerusuhan, melainkan karena terbatasnya sarana alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan, artinya disini warga Gunung Padang yang merupakan korban penggusuran melakukan tindakan untuk mempertahankan keberadaannya karena terbatasnya sarana terhadap perubahan.

5. Ketiadaan Pemahaman dan Sosialisasi

Selain kekecewaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dan juga ketiadaan alternatif yang lebih baik masyarakat mengungkapkan bahwa selama mereka disini bahkan sering kena gusur, pemerintah tidak pernah memberi pemahaman maupun sosialisasi tentang Izin Mendirikan Bangunan maupun menanyakan apakah masyarakat punya IMB. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Syamsuri (47 tahun, Nelayan):

“....katiko sabalum sosialisasi pemerintah langsung se mangukua rumah tanpa ado ngecek apo-apo. Salain itu katiko digusur pun indak pernah nanyo lai punyo IMB kami atau indak. Kami nelayan disiko nyo jadi laurang tau kami samo peraturan-peraturan tu....”

(“....ketika sebelum sosialisasi pemerintah langsung mengukur rumah tanpa mengatakan maksud mereka. Selain itu ketika di gusur juga tidak pernah menanyakan apakah rumah kami ada IMB atau tidak. Kami hanya nelayan disini jadi kurang tau samo peraturan-peraturan tu....” (wawancara 11 Desember 2011)

3.3.3 Sosial

1. Kelompok Sosial

Secara sosiologis istilah kelompok sosial mempunyai pengertian sebagai suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi, dimana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama (Abdulsyani, 1994:98).

Faktor-faktor yang menjadi alasan dari masyarakat bertahan di daerah rawan bencana merupakan suatu tindakan yang mempunyai hasrat dan keinginan bersama menjadi satu dengan lingkungan mereka sehingga ada suatu reaksi yang akan menyebabkan suatu tindakan. Seperti yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto bahwa semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu:

- a. keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (masyarakat)
- b. keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya

Untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. (Soekanto, 1997:125).

Dalam hal ini seorang individu mempunyai keinginan untuk menyatu dengan manusia lainnya untuk sama-sama merasakan kehidupan di pinggiran kota. Untuk itu mereka menciptakan rumah, mencari sumber makanan dan

pendapatan. Menjadi nelayan di laut dan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga hubungan antara mereka bertambah erat dan lahiriah perasaan senasib, kepentingan dan tujuan yang sama hingga akhirnya terciptalah kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok tersebut berinteraksi yang menghasilkan pandangan kebaikan dan keburukan yang merupakan nilai-nilai dan berpengaruh terhadap cara pola pikirnya untuk mengambil sikap. Sikap tersebut lazimnya membentuk perilaku tertentu, yang kemudian menjadi pola perilaku apabila berlangsung secara sinambung (Soekanto, 1997:128). Seperti yang diungkapkan oleh informan Sarimisa (55 tahun) mengatakan bahwa:

“...kami datang kesini dahulunya karena ada seorang teman yang pulang liburan ke Nias setelah merantau dari Padang dan kehidupannya jauh lebih baik daripada di kampung sampai ia bisa membelikan banyak barang untuk orangtuanya, kami tertarik dengan ajakannya hingga kami ikut dengannya dan membuat rumah disini...” (wawancara 11 Desember 2011)

Seberang Pabayan awalnya hanyalah sebuah perbukitan hutan lindung, adanya suatu keinginan untuk membuka ladang dan perkebunan membuat beberapa orang bekerjasama dan membuka sebuah permukiman sehingga mereka menganggap perbukitan tersebut tanah tumpah darah mereka, akhirnya mereka berkembang dengan beranak cucu. Seiring berjalannya waktu karena suatu keadaan beberapa orang akhirnya terpaksa pergi meninggalkan daerah tersebut dan masuklah orang-orang baru dan menetap disana. Awalnya sebagai pendatang mereka berjanji hanya menetap sampai mendapat pekerjaan, tetapi karena kerasnya persaingan antara sesama urbanis dan juga persaingan dengan warga

kota lahirlah pengangguran dan perjanjian pun berubah menjadi menetap selamanya. Awalnya hanya berupa pondok-pondok lama kelamaan dengan mengandalkan lingkungan alam dan nasibpun semakin membaik mereka mengajak sanak saudara di kampung untuk ikut serta dengan mereka dengan impian yang sama. Seperti yang di ungkapkan oleh Yaman (27 tahun, Nias):

“...di daerah yang ada di bawah itu masih saudara dengan kami, yang rumahnya warna kuning itu kakak saya....” (wawancara 11 Desember 2011)

Hingga perbukitan tersebut berubah fungsi menjadi lahan terbangun yang padat permukiman. Bahkan ketika perbukitan tersebut telah berstatus rawan bencana mereka tetap bertahan dengan berbagai alasan.

Kelompok sosial adalah kumpulan dari sejumlah orang (berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu) yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi (Horton & Hunt, 1993: 214-216).

Kelompok sosial terpinggirkan atau lebih tepatnya kelompok sosial marjinal yaitu kelompok sosial yang menjadi bagian dari dua budaya atau dua masyarakat, tetapi tidak termasuk secara penuh (utuh) pada salah satu budaya atau masyarakat tersebut (Horton & Hunt, 1993: 402).

2. Kuatnya Persaudaraan dan Kekeluargaan

Untuk menggolongkan masyarakat urban di pinggiran kota-kota besar mereka tidak menjadi bagian penuh dari masyarakat kota, sehingga mereka luput

dari perencanaan dan sentuhan pembangunan fasilitas kota. Kelompok ini cenderung hidup seadanya dikarenakan ketidakberdayaan dalam persaingan hidup di pusat kota, seperti tidak mampu membeli maupun ketidakmampuan menyewa tanah atau perumahan di pusat kota. Dengan adanya kesamaan perlakuan tersebut membuat mereka bersama-sama hidup dan menempati hunian yang terletak dipinggiran kota dengan kondisi tanah yang kurang menguntungkan. Seperti yang diungkapkan oleh Sumitro (49 tahun tukang pos):

“...awak dulunyo samo keluarga si Syamsuri bagai tingga di jalan Arau, karano ado penggusuran waktu itu kami pindah kamari basamo-samo pado tahun 1980. Disiko ko kami lah sarupo keluarga se lai..”

“...saya dahulunya bersama keluarga Syamsuri tinggal di jalan Arau, karena ada penggusuran pada waktu itu kami pindah kesini bersama-sama pada tahun 1980. Disini kami sudah seperti keluarga...” (wawancara 31 Desember 2011).

Walaupun latarbelakang keluarga penduduk di lereng Gunung Padang sangat heterogen dengan ditemukannya banyak keluarga yang berasal dari etnis Nias, dan Jawa. Ikatan kekeluargaan sangat erat di sini, antara penduduk asli maupun pendatang, umumnya mereka saling mengenal. Begitupun hubungan dengan warga yang pernah menetap disana tetapi sudah pindah ke daerah lain. Banyak acara yang di gelar untuk mempererat silaturahmi baik acara tahunan seperti pagelaran musik orgen tunggal ketika libur lebaran maupun ketika acara pernikahan. Seperti yang di ungkapkan oleh Informan Ujang:

“... urang disiko ko lah samo se nyo baiak asli atau nieh, malah acok maadokan acara disiko, rayo kapatang tu ajo orgen nan di sponsori dek Gudang Garam...”

("...orang disini sudah sama baik asli atau Nias, malah sering mengadakan acara disini, lebaran kemarin saja ada orgen yang di sponsori oleh Gudang Garam...") (wawancara 1 Desember 2011)

Begitupun yang di ungkapkan oleh Ketua RT Zulnedi yang mengatakan rasa solidaritas dan persaudaraan pemuda-pemudi di lereng Gunung Padang sangat erat dan saling merangkul satu sama lain tanpa membanding-bandingkan asal keturunan, sewaktu wawancara bertepatan dengan acara pernikahan salah satu pemuda yang jarak rumah mereka hanya berjarak beberapa meter:

"...kompaknya pemuda pemudi disiko babeda dima-ma se, kalau ado acara misalnya acara balimau atau acara nikahan sajo mode kini a, rami mah nan ka manolong mandekor. Baitupun kalau ado acara sarupo acara tahunan kami disiko acara kumpua-kumpua libur hari rayo sampai mandapek sponsor mah panitia acara, siap tu diundanglah urang-urang penting ataupun urang nan pernah tingga di Gunuang Padang ko duluno..."

("...kompaknya pemuda-pemudi disini berbeda daripada dimana saja, kalau ada acara misalnya acara berlimau atau acara nikahan seperti sekarang ini, banyak yang menolong mendekorasi. Begitupun jika ada acara seperti acara tahunan kami disini acara kumpul-kumpul (silaturahmi) libur lebaran sampai-sampai mendapatkan sponsor pemuda panitia acara, barulah diundang orang-orang penting ataupun orang-orang yang pernah tinggal di Gunung Padang dahulunya...") (wawancara 11 Desember 2011)

3. Saling Percaya Antar Sesama

Dengan adanya persamaan hak, nasib, maupun kesamaan perlakuan baik antara warga asli maupun pendatang menumbuhkan rasa persaudaraan dalam kehidupan mereka tanpa memandang status sosial, agama maupun ras. Kondisi permukiman di lereng perbukitan serta adanya rasa saling percaya diantara sesama merupakan poin plus yang mereka dapatkan di Gunung Padang ini. Mereka tidak

percaya akan menemukan rasa nyaman dengan kehidupan di daerah datar atau di pusat perkotaan. Mereka beranggapan hidup di daerah lain hanya akan bertemu dengan berbagai bentuk kriminalitas dan konflik sehingga mereka tidak berani turun dari Gunung Padang.

Seperti yang dituturkan oleh beberapa informan yang penulis pilih berdasarkan kriteria pernah menghuni daerah lain sebelum tinggal di Gunung Padang salah satunya seperti yang di ungkapkan oleh Masconglase (35 tahun). Informan asli Nias yang bekerja sebagai buruh angkut pelabuhan, yang juga pernah menjadi korban penggusuran ketika ada rencana proyek jalan tembus ke pantai Air Manis. Dimana dulunya bapak Mascong pernah menyewa rumah di bukit Gado-Gado. Walaupun di bukit Gado-Gado juga merupakan perbukitan tetapi dia beserta istri dan satu anaknya hanya tahan 1 minggu karena tidak nyaman disana.

“...awak tinggal di gunuang padang ko alah 10 tahun. Awak pindah dari kampung (Nias) awak tinggal di Bukik Gado-gado hanyo tahan saminggu langsung awak pindah kasiko. awak bisa batahan disiko karano nyaman disiko. Salamo disiko ndak ado ribui-ribuik, manjamua kain ndak ado ilang-ilang walaupun ditinggaan samalaman. Ndak ado urang mancilok-cilok. Kalau masalah awak tinggal di tanah nan rawan longsor, tu ka ba'a lai itulah resiko wak tinggal di tapi lauik, di ateh bukit, kalau masalah mati tu ka Tuhan awak basarah nyo,....”

(“...saya tinggal di Gunung Padang ini sudah 10 tahun. Saya pindah dari kampung (Nias) kami awalnya tinggal di Bukit Gado-gado tetapi hanya tahan 1 minggu setelah itu langsung pindah kesini. Saya tahan disini karena aman, selama disini tidak ada keributan, menjemur pakaian saja misalnya tidak pernah hilang walaupun ditinggalkan semalaman, tidak ada orang yang akan mencuri. Kalau masalah saya tinggal di tanah yang rawan longsor, ya bagaimana lagi itu sudah resiko kami tinggal ditepi laut, diatas bukit, kalau masalah mati ya ke Tuhan saja kita berserah diri...”
(wawancara 11 Desember 2011)



Gambar 3.8 Rumah-Rumah Yang Berada di Lereng Bukit Yang Terjal

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Butet (Yurlina) informan yang juga asli Nias. Sebelumnya dia bersama suami dan satu anaknya pernah mengontrak rumah di sungai sapik Palinggam. Tetapi hanya bertahan disana selama 1 tahun dari tahun 2007 sampai 2008, dan baru tinggal di Seberang Pabayan selama 3 tahun. Alasan ia memilih tinggal disini karena susahny kehidupan dibawah seperti mahalny harga sewa rumah.

“...kami sudah coba mengontrak di daerah sungai sapik palinggam tahun 2007 tetapi tidak nyaman disana. selain karena mahalny uang kontrakan juga tidak sesuai dengan yang punya rumah yang menganggap kami rendah...” (wawancara 7 Desember 2011)

Mereka meyakini bahwa disinilah tempat mereka bisa menemukan ketenangan setelah sebelumnya mereka telah jera mencoba tinggal di tempat lain. Kesimpulan peneliti juga diperkuat oleh penuturan Pak Zulnedi (48 tahun) sendiri selaku ketua RT:

“...disiko ko aman. Salamo awak jadi RT disiko ha ndak pernah terjadi kemalingan, pencurian ataupun masalah kriminal nan lain. Yo ba'a lai kalo adopun maling dari lua kama nyo ka lari? Sedangkan kepedulian kami kuek disiko. Nyo lari ka ateh sabaliaknyo jurang, karang, lari ka sabalah sinan lauik, lari ka arah jembatan banyak masyarakat nan ka di tamui lay. Pos siskamling banyak di tapi jalan sampai pagi banyak juo pemuda-pemuda disiko nan alun lalok lay. Warga nan tinggal di ateh nyo tinggaan se motornyo di bawah nyo ndak dimuka kadai urang, aman se sampai pagi...”

(“...disini aman, selama saya menjadi RT disini belum pernah terjadi kemalingan, pencurian, maupun masalah kriminal lainnya. Ya gimana lagi, walaupun ada maling dari luar, kemana dia akan lari? Sedangkan kepedulian kami kuat disini. Kalau dia lari ke atas dibaliknya jurang ada karang, lari kearah sana laut, lari ke arah jembatan banyak masyarakat yang akan ditemui. Pos siskamling banyak ditepi jalan, sampai pagi masih banya pemuda-pemuda disini yang belum tidur. Warga yang tinggal diatas meninggalkan motornya dibawah atau didepan kedai orang dan aman saja sampai pagi...” (wawancara 25 Mei 2011)

Gunung Padang merupakan kawasan perbukitan yang terletak di pinggiran kota Padang dan di kanan kiri maupun belakang perbukitan ini terdapat perairan seperti Samudra Indonesia maupun sungai. Letak permukiman penduduk yang berada di lereng bukit merupakan tempat teraman bagi penduduk atas segala bentuk kriminal maupun segala bentuk tekanan yang sering terjadi di perkotaan. Sehingga dengan adanya rasa saling percaya di antara sesama telah menciptakan rasa nyaman dalam kehidupan mereka, walaupun dengan status sosial yang berbeda. Jika malam hari datang keluarga yang memiliki kendaraan dan tinggal di tempat yang jauh lebih tinggi mempercayakan kendaraan mereka ditinggalkan di depan halaman atau pekarangan warga tanpa adanya kekhawatiran akan kehilangan.

3.3.4 Psikologi

Tingginya arus urbanisasi, padatnya penduduk kota, rendahnya pendapatan, dan mahalnya harga lahan di daerah datar membuat penduduk disini tidak berani pindah ke daerah lain. Keterbatasan ekonomi membuat mereka hanya sanggup menghuni tanah yang hanya memiliki izin pakai saja. Mereka beranggapan kalau masalah bahaya atau rawan longsor dan tsunami itu hal lain karena jika dipikir-pikir mungkin hampir semua kawasan di kota Padang ini rawan. Mereka yakin sepenuhnya jika sudah takdir kemanapun mau tinggal pasti akan mati juga akhirnya. Sebuah pemikiran yang bagus untuk menjawab pertanyaan peneliti seperti yang diungkapkan oleh Sumitro:

“...payah iduik di bawah, harago sewa rumah maha itupun ndak jauh beda samo rumah ko bantuaknyo. Kalau masalah bahaya nan ka datang mungkin ndak disiko se nan rawan tapi di daerah bawah tu ha sarupo di jalan-jalan utama tu labiah rawan lo lay. Tiok sabanta urang mati kecelakaan, tiok sabanta ado se kemalingan, malah pas gampo kapatang tu disitu nan banyak korban disiko cuma di goyang stek se rumah ko nyo....”

“...susah hidup dibawah, harga sewa rumah malah itupun tidak jauh beda sama rumah ini bentuknya. Kalau masalah bahaya yang akan datang mungkin tidak disini saja rawan tetapi di daerah bawah seperti di jalan-jalan utama mungkin lebih rawan lagi. Tiap sebentar ada orang meninggal kecelakaan, tiap sebentar ada kemalingan, malah pas gempa kemaren disana yang banyak korban disini cuma digoyang sedikit saja rumah ini....”
(wawancara 11 Desember 2011)

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan Sarimisa (55 tahun asli Nias, pekerja di pabrik kerupuk merah di Cendana) sewaktu diwawancara diwakilkan oleh anaknya Yaman dikarenakan ibu Sarimisa susah berbahasa Indonesia maupun berbahasa Minang:

“...hanya disini yang sanggup, beli tanah maupun sewa rumah di dekat cendana mahal mending bangun rumah disini saja, ada uang bayar kalau tidak ada tidak apa-apa juga sama yang punya tanah. Kalau masalah rawan bahaya kalau sudah ajal ya bagaimana lagi semua itu Tuhan yang menentukan...” (wawancara 11 Desember 2011)

Walaupun lokasi tempat kerja di daerah datar dekat namun harga dan sewa tanah mahal, tetapi di Gunung Padang ada izin pakai dari pemilik tanah sehingga penduduk cenderung bertahan walaupun dengan berbagai resiko.

Sehubungan itu, diasumsikan adanya kota dengan pusat tunggal yang terletak di dataran tanpa topografi yang menonjol, sedang segala kegiatan penduduknya bertumpuk di pusat kota. Di dalam kota, biaya transportasi meningkat langsung mengikuti jarak yang ditempuh dari pusat kota, namun sewa

yang tergantung dari keterjangkauan (*accessibility*) saja, berbanding terbalik dengan jarak. Artinya semakin menjauhi pusat kota, semakin menurunkan sewa. Para pemakai tanah di dalam kota menggunakan keputusan menurut tempatnya masing-masing dengan memperhitungkan kekuatan kantong mereka sehingga derajat menurunnya *economic rent* yang ingin mereka pakai untuk berbelanja, amat curam (Daldjoeni, 2003: 201).

Proposisi sukses Homans mengatakan bahwa dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh suatu ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Dalam proposisi ini Homans menyatakan bahwa bilamana seseorang berhasil memperoleh ganjaran (menghindari hukuman) maka ia akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut (Homans dalam Poloma, 2007:61).

Karena tidak adanya peraturan yang mengikat maupun aturan dari pemilik tanah membuat warga pendatang yang awalnya tidak memiliki apa-apa setelah diberi kesempatan berupa hak pakai untuk membangun dan menetap oleh pemilik tanah di Gunung Padang membuat ia bisa leluasa membangun rumah di atasnya

3.3.5 Keterbatasan Lahan

Alasan ini umumnya menjadi alasan dari kebanyakan informan khususnya pendatang. Karena tanah yang hanya punya hak pakai dan tidak punya kekuasaan apa-apa membuat mereka tidak mampu untuk bekerja sebagai petani sekalipun mereka tinggal di kawasan tanah pertanian. Walaupun ada diantara mereka yang

berani bercocok tanam tetapi mereka hanya berani menanam tanaman musiman seperti pisang dan hanya berani beternak ayam beberapa ekor saja. Seperti yang diungkapkan oleh Desriani (39 tahun):

“...uda nelayan, kami indak punyo tanah hanyo manyewa se nyo, ladang pisang ado 1/3 hektar mungkin. Ndak barani batanam luas-luas do soalnyo ndak tanah awak, awak manumpang disikonyo....”

“...suami nelayan, kami tidak punya tanah hanya menyewa saja, ladang pisang ada 1/3 hektar mungkin. Kami tidak berani bertanam luas-luas soalnya bukan tanah kami, kami hanya menumpang disini...”(wawancara 1 Desember 2011)

Begitupun yang diungkapkan oleh Anilase (35 tahun ibu rumah tangga) asal Nias.

“...kami hanya menggantungkan hidup dari kerja abang sebagai buruh pelabuhan, kalau bertani kami tidak punya lahan. Hanya ternak ayam yang kami punya itupun belum sampai sepuluh ekor dan masih kecil-kecil...” (wawancara 11 Desember 2011)

Selain karena tidak punya hak untuk bercocok tanam seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan diatas, faktor lain yang membuat keterbatasan lahan untuk membuka lahan pertanian adalah dikarenakan kawasan Gunung Padang khususnya yang berada pada 45° kelerengan bukit yang merupakan kawasan produktif untuk bercocok tanam merupakan lahan tidur atau banyaknya kuburan yang terdapat disana. Dari hasil observasi kuburan-kuburan tersebut sangatlah banyak bahkan jarak antara kuburan yang satu dengan kuburan yang lain sangat berdekatan dan terkadang sulit menentukan yang mana kuburan dan yang mana nisan. Karena kuburan-kuburan tersebut jika tidak diberi pagar keramik sudah rata dengan tanah hanya nisannya saja yang masih terlihat.



Gambar 3.9 Rumah dan Areal Pekuburan

Berdasarkan hal itu dapat diinterpretasikan bahwa di kawasan khususnya yang berada pada 45° lereng bukit terdapat areal perumahan, areal pertanian dan areal perkuburan yang pada kenyataan bercampur. Areal perkuburan kadang bisa berada di bawah jenjang rumah, terkadang di halaman dan ada juga sudah menjadi jenjang untuk mencapai rumah warga dengan dikelilingi semak belukar dan sedikit areal pertanian. Semestinya ada pemisahan antara ke tiga areal ini sehingga hal ini memperkuat alasan bahwa adanya keterbatasan lahan untuk bekerja disektor pertanian.

3.4 Kebijakan Pemerintah Bagi Permukiman Penduduk di Lereng Gunung Padang

Menurut buku Profil Kota Padang wilayah kecamatan padang selatan yang terbentang dari teluk bayur hingga ke gunung padang batang arau terdapat banyak lahan tidur diatas pegunungan, sehingga secara teori tidak bisa dikeluarkan IMB

nya. Adanya isu akan terjadinya tsunami dan gempa besar dikota padang sehingga warga takut membangun rumah dikecamatan padang selatan karena terlalu dekat dengan pantai. Tidak ada lagi pemutihan IMB untuk bangunan lama yang belum ada IMB nya, sementara bangunan lama yang belum memiliki IMB cukup banyak.

Tetapi untuk meminimalisir perkembangan permukiman lebih lanjut DTRB mengeluarkan kebijakan tata ruang seperti yang di ungkapkan oleh Lili (35 tahun, Staff Perencanaan Ruang Kota Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang) yaitunya:

1. Kebijakan Insentif

Yaitu kebijakan yang memberi kemudahan dan keringanan kepada masyarakat agar bisa membangun sesuai kebijakan pembangunan tata ruang

2. Kebijakan Dis Insentif

Yaitu kebijakan yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan menghambat perkembangan permukiman. Contohnya: pajak ditinggikan, tidak diberi fasilitas listrik dan air dan juga sarana prasarana ke kawasan tersebut (wawancara 14 Desember 2011)

Selain itu keberadaan permukiman disini juga terancam karena berdasarkan perencanaan struktur ruang kota, dimana Gunung Padang direncanakan sebagai kawasan wisata terpadu dengan adanya berbagai pembangunan untuk memperindah maupun memperlancar akses kesana.

Seperti yang di ungkapkan oleh Lili (staff perencanaan ruang kota)

“...untuk kawasan Gunung Padang perencanaan tata ruangnya dikhususkan untuk pengembangan kawasan wisata terpadu Taman Siti Nurbaya, makanya sekarang banyak pembangunan untuk memperindah maupun mempermudah akses ke sana....” (wawancara 14 Desember 2011

Dari penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan permukiman Gunung Padang yang rawan bencana tetapi padat permukiman liar membuat IMB tidak bisa dikeluarkan karena berbagai alasan seperti :

- a. Merupakan paru-paru kota yang artinya jika diberi IMB akan semakin banyak bermunculan permukiman baru sehingga lama kelamaan lahan tersebut berubah fungsi menjadi lahan terbangun yang menyebabkan kerawanan yang semakin parah.
- b. Tanah ulayat yang merupakan milik kaum sehingga kepemilikan tanah tidak ada membuat pengurusan IMB juga tidak akan bisa. Karena kaum tidak menjual tanah mereka sehingga DTRB tidak bisa berbuat banyak membantu penduduk.
- c. Kawasan Gunung Padang merupakan kawasan yang direncanakan sebagai kawasan wisata terpadu yang artinya kawasan ini akan pesat dengan pembangunan infrastruktur sehingga berdampak terhadap permukiman penduduk.

Penduduk lereng Gunung Padang sebagai manusia yang rasional akan memilih tindakan yang akan dilakukannya dalam mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat disana tentunya akan melakukan segala

cara terhadap berbagai peraturan dan tindakan yang dikeluarkan pemerintah. Walaupun memang masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bermukim secara resmi, telah mendapatkan peringatan dan pembongkaran. Tetapi dengan adanya strategi seperti meminta jaminan tempat tinggal baru ataupun ganti rugi beserta adanya alasan untuk bertahan, tentunya individu akan bertindak sesuai dengan posisi dan kemampuannya. Baik atau buruknya resiko yang akan lahir dari perilaku tersebut dan sejauh mana mereka bisa melakukan cara agar bisa terhindar dari ancaman bencana maupun ancaman dari pemerintah untuk membongkar paksa tempat tinggal mereka.



BAB IV

KESIMPULAN

1.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang membuat bertahannya keluarga yang bermukim di daerah rawan bencana lereng Gunung Padang Kec. Padang Selatan terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Ekonomi

Di dalam aspek ini terdapat berbagai alasan yang berhubungan dengan ekonomi seperti kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan sehingga tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi nelayan dan buruh, tuntutan mata pencaharian sebagai nelayan yang memanfaatkan kawasan Gunung Padang sebagai permukiman yang tidak jauh dari sumber mata pencaharian, murahnya sewa tanah atau uang pakai tanah dari pemilik tanah kaum di Gunung Padang sedangkan di daerah datar mahal.

2. Aspek Hukum

Didalam aspek ini juga di analisis lagi dengan berbagai alasan yang berhubungan dengan hukum dan pemerintah seperti lemahnya hukum yang dibuat pemerintah tentang rumah yang tidak memiliki IMB maupun tentang permukiman ilegal yang bermukim di Gunung Padang, kurangnya perhatian pemerintah terhadap keluarga yang terkena gusur, ketidak pedulian pemerintah ketika terjadi penggusuran penduduk kembali bermukim di kawasan ini, ketiadaan alternatif

yang lebih baik dari pemerintah membuat masyarakat terpaksa bertahan di kawasan ini karena walaupun terkena gusur berkali-kali mereka diberi ganti rugi tanpa diberi solusi, selanjutnya ketiadaan pemahaman dan sosialisasi dari pemerintah tentang berbagai kebijakan maupun tentang berbagai peraturan seperti peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Aspek Sosial

Terbentuknya kelompok sosial yang berawal dari perasaan senasib, persamaan hak, maupun persamaan latar belakang sehingga persaudaraan dan kekeluargaan terjalin kuat sehingga tidak ada keraguan maupun kecurigaan karena sudah tertanam rasa saling percaya terhadap sesama.

4. Aspek Psikologi

Walaupun mayoritas permukiman penduduk berada di lereng bukit bahkan tak jarang sering tertimpa longsor, tidak membuat masyarakat gentar dan tidak mempunyai keinginan untuk pindah dari kawasan ini dengan berani menerima berbagai resiko.

5. Aspek Lahan

Perbukitan Gunung Padang yang produktif telah bercampur antara areal pekuburan dengan permukiman penduduk sehingga terjadilah keterbatasan lahan untuk dapat bekerja disektor pertanian.

4.2 Saran

1. Walaupun mayoritas alasan bertahannya keluarga di lereng Gunung Padang karena alasan ekonomi, setiap keluarga haruslah lebih memperhatikan keselamatan harta, jiwa dan keluarga mereka dari bahaya.
2. Pemerintah harus lebih peduli akan nasib dan keselamatan keluarga yang bermukim di daerah rawan bencana. Perhatian itu bisa berupa penyuluhan maupun sosialisasi akan keberadaan permukiman mereka di zona rawan bencana. Begitu juga dengan ilegalnya permukiman mereka di sana haruslah disikapi dengan tegas dan bijaksana.
3. Rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang sudah terjalin erat antara warga asli dan pendatang harus tetap dipegang teguh tanpa memikirkan perbedaan latar belakang dan status sosial.
4. Setiap keluarga jangan hanya pasrah, tetapi mereka haruslah lebih memahami keberadaan permukiman di zona rawan bencana.
5. Semestinya ada pemisah antara lahan pertanian dengan areal perkuburan. Supaya masyarakat bisa memiliki mata pencaharian di sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Ardi. 2002. *Diktat Mata Kuliah Sosiologi Perkotaan*. Jurusan Sosiologi: FISIP UNAND.
- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi aksara
- Afrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari Pengertian sampai Penulisan Laporan*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- BPS (Badan Pusat Statistik), 2010. *Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*.
- Colombijn, Freek, 2006. *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota Pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak
- Daldjoeni. N. 2003. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung, Penerbit PT. ALUMNI
- Evers, Hans, Dieters 1995. *Sosiologi perkotaan; Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : LP3ES
- Gilbert, Allan. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hariyono, Paulus (2007), *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*, Jakarta: Bumi Aksara
- Horton, Paul B. & Hunt, Chester L. 1993. *Sosiologi Edisi Keenam* (Alih Bahasa : Aminuddin Ram & Tita Sobari). Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Johnson. P. Doyle, 1986. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 1*. Terj. Robert M.Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rusdakarya.
- Murbaintoro, Tito, 2009. "Potensi Instrumen Pembiayaan Syariah dan Wakaf untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman" dalam Seminar Sehari Potensi Wakaf Untuk Bidang Perumahan Rakyat. Jakarta : Kementerian Negara Perumahan Rakyat
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Pramono, Wahyu, 2005. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi dan Buku Konsultasi*. Padang : Labor Sosiologi FISIP Universitas Andalas

Ritzer, George, 2004. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. (terj. Alimandan)* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Ritzer, G. dan Douglas J. Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta : Prenada Media

Yunus, Hadi, Sabari, 2008. *Dinamika Wilayah Peri – Urban Determinan Masa Depan Kota.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Soefaat,(edr).1997. *Kamus Tata Ruang.* Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

Soekanto, Soerjono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta : RajaGrafindo Persada

Sugandhy, Aca. 2007. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soetomo, 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan.* Jakarta : Pustaka Jaya

Tucker C. Robert, 1978. *The Marx-Engles Reader.* Norton

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman : Kementerian Perumahan Rakyat Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Biro Hukum dan Kepegawaian

Skripsi:

Arif, Anhar, 2009. *Pengelolaan Lingkungan Pada Permukiman Kumuh Perkotaan. Studi kasus Permukiman Kumuh di Simpang Haru Kota Padang : Skripsi Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas*

Azwir, Nur, Widya, 1997. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang IMB dengan Persepsi Masyarakat terhadap Prosedur Birokrasi yang Dilaksanakan Untuk Memiliki IMB. Studi Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang : Skripsi Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas*

Badruzzaman (2008), *Dampak Perkembangan Permukiman Terhadap kehidupan Sosial Keagamaan di Kota Palopo.*

Kirmanto, Djoko (2001), *Kebijakan dan Strategi Nasional Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Palembang. Skripsi Palembang*

Statistik :

BPS Kota Padang 2010

Data Dasar Profil Kelurahan Batang Arau 2010

Koran:

Padang Ekspres, "IMB dan Logika Masyarakat Awam", Rabu, 06 April 2011

Internet:

[http://www.kemenpera.go.id/Kongres Nasional Perkim Harus Hasilkan Rekomendasi Pengembangan Perumahan.html](http://www.kemenpera.go.id/Kongres_Nasional_Perkim_Harus_Hasilkan_Rekomendasi_Pengembangan_Perumahan.html). *diakses 16 Juni 2011*

[http://www.mediaindonesia.com/Ribuan Rumah tak Layak Huni Direhabilitasi.html](http://www.mediaindonesia.com/Ribuan_Rumah_tak_Layak_Huni_Direhabilitasi.html). *diakses 16 Juni 2011*

<http://dedihermon.blogspot.com/2011/03/model-kestabilan-lahan.html>. *diakses 16 juni 2011*

[http://www.kompas.com/Menpera Tentang Rumah Tidak Layak Huni.html](http://www.kompas.com/Menpera_Tentang_Rumah_Tidak_Layak_Huni.html). *diakses 16 Juni 2011*

[http://padang.go.id/SK Walikota Nomor 06 tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.html](http://padang.go.id/SK_Walikota_Nomor_06_tahun_2004_Tentang_Pemberian_Izin_Mendirikan_Bangunan.html). *Diakses 27 Mei 2011*

<http://peneliti.budiluhur.ac.id/srikurniasih-.pdf>. *Diakses 16 Juni 2011*

[http://eprints.lib.ui.ac.id/gihguntoro/Pengaruh Modal Sosial-Pendahuluan pdf](http://eprints.lib.ui.ac.id/gihguntoro/Pengaruh_Modal_Sosial-Pendahuluan.pdf). *Diakses 16 Juni 2011*

<http://digilib.its.ac.id/public/TTS-Master-12528-Chapter1.pdf>) Hendri Zulfinton "Konsep Rusunawa Untuk Urban Renewal Bagi Permukiman Kumuh Studi Kasus Kawasan Pantai Purus Kota Padang". *Diakses 20 Oktober 11*

<http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=288> *Diakses 13 November 2011*

<http://wordpress.com/2008/10/08/urbanisasi-danmasalahperkotaan>.

Diakses 13November 2011

www.antara-sumbar.com/id/index.php?trtb-padang-akan-naikkan-biaya-imb-30-persen.html *Diakses 13November 2011*